

Skripsi

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN
MANGROVE DI DESA MATTIRO BAJI KECAMATAN
MAPPAKASUNGGU PULAU TANAKEKE DI
KABUPATEN TAKALAR**

Di susun dan Di usulkan oleh :

MIRNAWATI

Nomor Stambuk : 105640160512



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2017

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN
MANGROVE DI DESA MATTIRO BAJI KECAMATAN
MAPPAKASUNGGU PULAU TANAKEKE DI
KABUPATEN TAKALAR**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

MIRNAWATI

Nomor Stambuk : 105640160512

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Mangrove di Desa Mattiro Baji Kecamatan Mappakasunggu Pulau Tanakeke di Kabupaten Takalar.

Nama Mahasiswa : Mirnawati

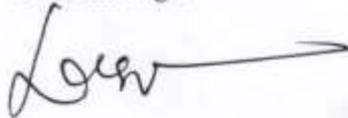
Nomor Stambuk : 105640160512

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Makassar, Agustus 2017

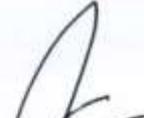
Menyetujui:

Pembimbing I



Dra. Hj. Djulianti Saleh, M.Si

Pembimbing II



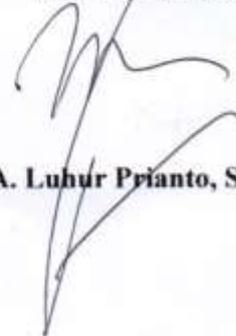
Drs. H. Ansyari Mone, M.pd

Mengetahui :



Ir H. Saleh Molla, MM

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor 1184 / FSP / A. 1-VIII / VIII / 38 / 2017, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari jum'at tanggal 25 bulan agustus tahun 2017.

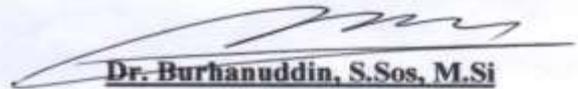
TIM PENILAI

Ketua,



Ir. H. Saleh Molla, MM

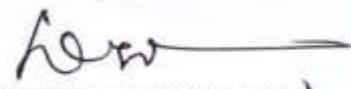
Sekretaris,



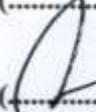
Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

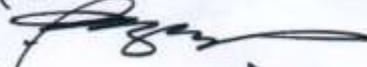
1. Dra. Hj. Djulianti Saleh, M.Si

(.....


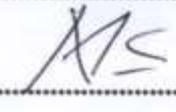
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

(.....


3. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si

(.....


4. Abd. Kadir Adys, SH. MM

(.....


PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **Mirnawati**

Nomor Stambuk : 105640160512

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun pencabutan gelar akademik.

Makassar, Agustus 2017

Yang Menyatakan,

Mirnawati

NIM. 105640160512

ABSTRAK

MIRNAWATI. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Mangrove Di Desa Mattiro Baji Kecamatan Mappakasunggu Pulau Tanakeke di Kabupaten Takalar.*

**Pembimbing I Hj. Djuliaty Saleh
Pembimbing II H. Ansyari Mone**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui partisipasi masyarakat serta pengembangan mangrove di Desa Mattiro Baji Kecamatan Mappakasunggu pulau Tanakeke Kabupaten Takalar.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif (menjelaskan kondisi objek dengan cara-cara ilmiah) dengan tipe penelitian yakni studi kasus dengan informan sebanyak 7 (tujuh) orang antara lain : Ketua UPTD Pertanian, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat Dan Masyarakat. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa : Wawancara, Observasi serta dikembangkan dengan Dokumentasi terhadap informan.

Hasil penelitian ini didapatkan partisipasi masyarakat di Desa Mattiro Baji diwujudkan melalui partisipasi dalam perencanaan dimana masyarakat antusias mengikuti sosialisasi namun kurang memberikan usulan dan pendapat karena kurang berpengalaman, partisipasi dalam pelaksanaan dimana masyarakat masih kurang memberikan sumbangan berupa materi dan tenaga karena taraf pendapatan yang masih rendah namun sangat optimal melakukan kegiatan/program pengembangan mangrove untuk mendukung pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan dimana masyarakat dapat mengembangkan rumput laut dan budidaya penangkaran ikan dan kepiting agar dapat menikmati hasil tangkapannya sendiri, partisipasi dalam pengawasan dimana masyarakat dapat melakukan pemeliharaan mangrove serta dapat melakukan perlindungan terhadap pengembangan mangrove.

Pengembangan mangrove di Desa Mattiro Baji sudah banyak dikembangkan tetapi masih memerlukan perbaikan terutama dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat dan faktor yang mempengaruhi pengembangan mangrove adalah faktor pendukung yaitu kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Serta kesadaran masyarakat untuk berperang aktif menjaga kawasan mangrove. Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat luar serta komunikasi masyarakat terhadap pemerintah yang masih kurang.

Keyword :Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Mangrove

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN MANGROVE DI DESA MATTIRO BAJI KECAMATAN MAPPAKASUNGGU PULAU TANAKEKE DI KABUPATEN TAKALAR”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Dra. Hj. Djulianti Saleh, M.si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Ansyari Mone, M.pd selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
2. Bapak Drs. Muhammad Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Bapak A.Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan yang selama ini selalu membantu saya dalam pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik.

4. Kedua Orang Tuaku yang telah mendukung dan merespon penuh dan telah mencurahkan seluruh kasih sayang dan pengorbanan yang diberikan selama ini hingga saya sampai ke jenjang pendidikan S1, mudah-mudahan pengorbanan beliau memperoleh ridho dan mendapatkan balasan dari Allah SWT
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf FISIPOL Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu selama penulis menempuh pendidikan sampai tahap penyelesaian studi.
6. Para pihak Dinas/Instansi yang ada pada lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar yang telah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kepada semua keluarga, dan teman-teman terutama anak-anak IP 012 khususnya kelas B, yaitu abang dirga, evhy, asfirah, wani, ilham, ayu. Terimah kasih atas bantuan yang diberikan, baik berupa materi maupun dorongan selama proses perkuliahan sampai penyelesaian studi

Dengan segala keterbatasan, dan demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak membutuhkan.

Takalar, Agustus 2017

Penulis

Mirnawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENERIMAAN TIM	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Partisipasi Masyarakat	10
B. Konsep Mangrove	18
C. Pelaksanaan Pengembangan Mangrove	31
D. Kerangka Pikir	33
E. Fokus Penelitian.....	34
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	34
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi penelitian.....	39
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	39

C. Sumber Data.....	40
D. Informan Penelitian	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Analisis Data.....	41
G. Pengabsahan Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi dan Karakteristik Objek Penelitian	44
B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Mangrove Di Desa Mattiro Baji Kecamatan Mappakasunggu Pulau Tanakeke Di Kabupaten Takalar	49
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pengembangan Mangrove ...	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
RIWAYAT HIDUP	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bagian terpenting dari kondisi geografis Indonesia sebagai wilayah kepulauan adalah wilayah pantai dan pesisir dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Wilayah pantai dan pesisir memiliki arti yang strategis karena merupakan wilayah interaksi/peralihanantara ekosistem darat dan laut yang memiliki sifat dan ciri yang unik, dan mengandung produksi biologi cukup besar serta jasa lingkungan lainnya. Kekayaan sumber daya yang dimiliki wilayah tersebut menimbulkan daya tarik bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan secara langsung atau untuk meregulasi pemanfaatannya karena secara sektoral memberikan sumbangan yang besar dalam kegiatan ekonomi misalnya pertambangan, perikanan, kehutanan, industri, pariwisata dan lain-lain.

Wilayah pesisir merupakan ekosistem transisi yang dipengaruhi daratan dan lautan, yang mencakup beberapa ekosistem, salah satunya adalah ekosistem hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan penting di wilayah pesisir dan kelautan. Selain mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan (*nurseryground*) berbagai macam biota, penahan abrasi pantai, amukan angin taufan dan tsunami, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut, hutan mangrove juga mempunyai fungsi ekonomis yang tinggi seperti sebagai penyedia kayu, obat-obatan, alat dan teknik penangkapan ikan.

Wilayah laut dan pesisir terkandung sejumlah potensi sumber daya yang besar dan beragam. Salah satu sumber daya tersebut dapat diperbaharui (renewable resources), seperti ikan, udang, moluska, karang mutiara, kepiting, rumput laut, hutan mangrove dan hewan karang yang keberadaan dan kelestariannya tergantung dari pelestarian habitatnya. Selain hal tersebut juga berguna dalam jasa-jasa lingkungan seperti tempat-tempat (habitat) yang indah dan menyejukkan untuk potensi peristiwa dan rekreasi, media transportasi. Dari semua itu maka potensi kelautan dan pesisir mempunyai nilai ekonomi yang tinggi bagi semua elemen masyarakat, khususnya masyarakat pesisir.

Hutan mangrove sangat berpotensi untuk dikembangkan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat karena memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri seperti bentuk perakarannya yang khas serta berbagai jenis fauna yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove seperti ragan jenis, burung, kepiting, udang, ikan serta tempat berasosiasinya tumbuhan epifit seperti anggrek. Untuk itu potensi ekosistem mangrove sangat baik untuk dikembangkan sebagai daerah ekowisata alternatif.

Mangrove adalah hutan yang tropis yang hidup dan tumbuh di sepanjang pantai berlumpur atau lempung atau gambut atau berpasir dan selalu digenangi oleh air laut secara berkala dan mempunyai zona vegetasi yang sesuai dengan tempat tumbuhnya. Hutan mangrove terdapat di sepanjang pantai di daerah teluk dangkal, muara sungai, delta, bagian terlindung dari anjung dan selat. Peranan hutan mangrove sangat penting karena merupakan suatu ekosistem yang memiliki multifungsi yang penting bagi kehidupan.

Mangrove merupakan ekosistem yang sangat produktif. Keberadaannya mampu memperkaya keanekaragaman hayati, menghasilkan berbagai produk hutan komersial, melindungi garis pantai, serta mampu mendukung produksi perikanan di kawasan pesisir. Mangrove memiliki sistem adaptasi yang unik mengingat kondisi lingkungannya yang ekstrim, seperti kadar garam yang tinggi serta tanah yang kurang stabil dan tergenang. Mangrove di Indonesia adalah yang terbesar di dunia, luas mangrove di Indonesia adalah 3.112.989 m² atau 22,6% dari luas mangrove yang ada di dunia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, faktor antropogenik telah memberikan pengaruh pada ekosistem mangrove ini. Sekitar 45% mangrove di Indonesia telah mengalami degradasi cukup parah karena aktivitas manusia. Jumlah kerusakan tersebut diperkirakan akan semakin meningkat seiring pertumbuhan dan perkembangan pemukiman di kawasan pesisir.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian lingkungan. Terkait dengan pasal ini maka kehidupan suatu negara tidak bisa terlepas dari pembangunan. Namun, akhir-akhir ini lingkungan menjadi isu yang banyak dibicarakan. Hal ini dikarenakan oleh tingginya dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan yang dapat membahayakan eksistensi lingkungan itu sendiri, terutama aktivitas dalam hal pembangunan. Salah satu kerusakan lingkungan yang paling banyak terjadi adalah kerusakan pada hutan mangrove.

Vegetasi mangrove terdiri dari beberapa jenis antara lain *Rhizophora apiculata*, *R. Mucronata*, *Bruguiera gymnorrhiza*, *B. Parfivlora*, *B. Sexangula*.

Avicennia sp, sonneratia spp, Xylacarpus granatum, dan Ceriops tagal. Adaptasi pohon-pohon mangrove terhadap keadaan kekurangan oksigen dalam tanah adalah dengan membentuk system perakaran yang khas. Vegetai mangrove mempunyai struktur seragam yang tidak mengenal lapisan tajuk. Ekosistem hutan mangrove memiliki beberapa sifat kekhususan dipandang dari kepentingan sumber daya alam, yakni letak hutan mangrove terbatas pada tempat tertentu, peranan ekologis ekosistem hutan mangrove bersifat khas, berbeda dengan peran ekosistem hutan lainnya, dan hutan mangrove memiliki potensi hasil yang bernilai ekonomis tinggi, serta hutan mangrove sebagai sumber daya alam yang dapat dipulihkan pendaagunaannya memerlukan pengelolaan yang tepat, sejauh mungkin dapat mencegah pencemaran lingkungan hidup dan menjamin kelestariannya untuk keperluan masa kini dan akan datang.

Pertambahan jumlah penduduk yang tinggal dikawasan pesisir menyebabkan tekanan terhadap ekosistem mangrove yang ada. Sebagaimana yang terjadi di pesisir pantai, jumlah mangrove yang ada mengalami penurunan yang drastis seiring dengan tingginya aktivitas ekonomi di kawasan ini. Beberapa faktor penyumbang terbesar kerusakan ekosistem mangrove di pesisir yaitu: pertambahan, penebangan mangrove, reklamasi dan sedimentasi, serta pencemaran lingkungan. Penurunan jumlah mangrove yang terjadi semakin memperparah kondisi pesisir yang merupakan daerah abrasi. Upaya penanaman kembali mulai dilakukan untuk memulihkan keseimbangan lingkungan di kawasan pesisir. Program rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan akan menunjukkan hasil yang signifikan.

keberhasilan rehabilitasi tersebut akan memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir yang tinggal di sekitarnya.

Masyarakat merupakan salah satu unsur utama di dalam sistem pengembangan mangrove saat ini semakin dituntut peran sertanya. Sebetulnya sudah sejak lama model program partisipatif dikembangkan yang melibatkan masyarakat bahkan menempatkan masyarakat sebagai pelaku hutan sentral dari pengembangan yang sedang dan akan berlangsung, namun dalam penerapannya masih banyak terdapat kelemahan.

Mangrove memiliki nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi, tetapi sangat rentan terhadap kerusakan apabila kurang bijaksana dalam mempertahankan, melestarikan dan pengelolaannya. Kondisi hutan mangrove pada umumnya memiliki tekanan berat sebagai akibat dari tekanan kritis ekonomi yang berkepanjangan. Selain dirambah dan dialihfungsikan, kawasan mangrove di beberapa daerah kini marak terjadi kegiatan restorasi dan rehabilitasi. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi ekosistem mangrove yang telah rusak agar ekosistem mangrove dapat menjalankan kembali fungsinya dengan baik. Upaya rehabilitasi harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang berhubungan dengan kawasan mangrove.

Lahan yang berpotensi dilakukan rehabilitasi, restorasi dan pengelolaan hutan mangrove adalah milik negara, milik semua orang, seperti kawasan pantai, muara dan bantaran sungai. Melakukan rehabilitasi dan restorasi pada kawasan tersebut tanpa kepemilikan yang jelas, kecil kemungkinan untuk berhasil. Selanjutnya penanaman mangrove di lahan milik pribadi akan lebih besar

kemungkinan untuk berhasil bila adanya kesadaran pemilik lahan untuk menanamnya dengan insentif ekonomi yang jelas.

Pulau Tanakeke merupakan pulau yang terkenal di takalar, di banding tetangga sebelahnya pulau sanrobengi. Bagaimana tidak? Jumlah penduduk di Pulau Tanakeke lebih banyak, begitupun luas wilayah pulaunya, pulau ini menjadi salah satu tempat di mana bakau tumbuh subur dengan luas mencapai lebih dari 1.700-an hektar. Gencarnya alih fungsi lahan ke tambak udang membuat luas hutan bakau berkurang. Namun lebih dari 5 tahun terakhir, rehabilitasi hutan bakau gencar dilakukan kelompok lembaga swadaya masyarakat, yayasan hutan biru, itulah yang membuat hutan bakau kembali lebat di wilayah ini.

Sistem pengembangan mangrove akan kurang berarti apabila masyarakat lokal itu sendiri tidak ikut berpartisipasi dalam sektor pengelolaan mangrove di Pulau Tanakeke. Partisipasi masyarakat merupakan langkah awal untuk membangun kerja sama antar pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai pendorong suksesnya kebijakan tersebut dalam rangka pengembangan mangrove. Atas dasar itulah penulis mengambil judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Mangrove Di Desa Mattiro Baji Kecamatan Mappakasunggu Pulau Tanakeke Di Kabupaten Takalar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Mangrove di Desa Mattiro Baji Kecamatan MappakasungguPulau Tanakeke di Kabupaten Takalar?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam Pengembangan Mangrove di Desa Mattiro Baji Kecamatan Mappakasunggu Pulau Tanakeke di Kabupaten Takalar ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai melalui kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Mangrove di Desa Mattiro Baji Kecamatan MappakasungguPulau Tanakeke.
2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan Mangrove di Desa Mattiro Baji Kecamatan Mappakasuggu Pulau Tanakeke.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan sebagai peneliti sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teori ini adalah dapat menambah wawasan dan informasi tentang hal diteliti serta mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui penulisan penelitian ini serta penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam menambhahtulisan ilmiah dalam rangka pengembangan konsep dari teori terutama pada bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan mangrove.

2. Kegunaan praktis

Penulis berharap dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dan pembaca tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Mangrove di Desa Mattiro Baji Kecamatan Mappakasunggu Pulau Tanakeke di Kabupaten Takalar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Partisipasi Masyarakat

1. Konsep Partisipasi

Partisipasi masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata “participation” yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikuti sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, partisipasi merupakan keterlibatan aktif masyarakat atau partisipasi tersebut dapat berarti ketertiban proses penentuan arah dari strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

Dalam pelaksanaan pembangunan harus ada sebuah rangsangan dari pemerintah agar masyarakat dalam keikutsertaannya memiliki motivasi. Menurut Simatupang (dalam Yuwono, 2001:124) memberikan beberapa rincian tentang partisipasi sebagai berikut:

- a. Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha bersama yang dijalankan bahu-membahu dengan saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama
- b. Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam dalam negarapancasila kita, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terbinanya masa depan yang baru dari bangsa kita.

- c. Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-pelaksanaan, perencanaan pembangunan. Partisipasi berarti memberikan sumbangan agar dalam pengertian kita mengenal pembangunan kita nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.
- d. Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong ke arah pembangunan yang serasi dengan martabat manusia. Keadilan sosial dan keadilan nasional dan yang memelihara alam sebagai lingkungan hidup manusia juga untuk generasi yang akan datang.

Pendapat Suryono (2001:124) partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat ketertiban masyarakat secara aktif pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

2. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Rahardjo dalam Mardijono (2008:19) mengemukakan partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih lanjut dijelaskan

partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. Pada dasarnya partisipasi dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi yang bersifat swakarsa dan partisipasi yang bersifat dimobilisasi. Partisipasi swakarsa mengandung arti bahwa keikutsertaan dan peran sertanya atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri, sementara partisipasi yang dimobilisasikan memiliki arti keikutsertaan dan berperan serta atas dasar pengaruh orang lain.

Menurut Koentjaraningrat (2009:117), ikatan yang membuat suatu kesatuan manusia menjadi suatu masyarakat adalah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupan dalam batas kesatuan. Lagipula, pola itu harus bersifat mantap dan kontinu. Dengan kata lain, pola khas itu harus sudah menjadi adat istiadat yang khas. Warga suatu masyarakat harus juga mempunyai ciri lain, yaitu suatu rasa identitas bahwa mereka memang merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan manusia lainnya.

Perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan diatas kertas. Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari 2 hal, yaitu:

a) Partisipasi dalam perencanaan

Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah program-program pembangunan yang telah direncanakan bersama sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam

perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan. Namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili masyarakat.

b) Partisipasi dalam pelaksanaan

Segi positif dari partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga negara sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat di hindari.

Partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih lanjut dijelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. Pada dasarnya partisipasi dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi yang bersifat swakarsa dan partisipasi yang bersifat dimobilisasi. Partisipasi swakarsa mengandung arti bahwa keikutsertaan dan peran sertanya atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri, sementara partisipasi yang dimobilisasikan memiliki arti keikutsertaan dan berperan serta atas dasar pengaruh orang lain (Rahardjo dalam Mardijono (2008:19)

Menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003) membedakan partisipasi masyarakat menjadi empat tingkatan yaitu :

1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan

Dalam tahap perencanaan ini diukur dengan melihat jumlah kehadiran warga dalam rapat maupun penyuluhan sebelum adanya kegiatan penanaman mangrove serta keaktifan dalam memberikan berbagai usulan maupun pertanyaan dalam rapat

2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini, partisipasi masyarakat dilihat dalam melakukan kegiatan penanaman mangrove tersebut, baik atas inisiatif individu, kelompok maupun yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan ini indikator yang digunakan adalah frekuensi dalam pelaksanaan kegiatan inisiatif kegiatan dan kemauan untuk mencapai keberhasilan.

3. Partisipasi di dalam tahap pemanfaatan

Dalam tahap pemanfaatan ini hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang

4. Partisipasi di dalam tahap pengawasan

Kegiatan pengawasan ini sangat diperlukan, bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam

pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan, dalam hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan pembangunan sangat diperlukan.

Partisipasi sesuai dengan pendekatan partisipasi oleh verhangen yang menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang terkait dengan pembangunan kewenangan, tanggung jawab dan manfaat. Sehubungan dengan hal itu berbagai partisipasi meliputi :

- a. Mengikuti pertemuan-pertemuan maupun rapat-rapat
- b. Memberikan bantuan dan material
- c. Memberikan ide-ide/gagasandan pendapat
- d. Melibatkan diri dari kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat

Dusseldrop dalam Mardikanto (2003:23) membuat klasifikasi dari berbagai tipe partisipasi. Adapun penggolongan partisipasi berdasarkan pada derajat kesukarelaan ada dua bentuk yaitu partisipasi bebas dan partisipasi terpaksa. Partisipasi bebas dapat dibagi dalam dua kategori yaitu partisipasi spontan dan partisipasi terbujuk.

Partisipasi bebas terjadi bila seorang individu melibatkan dirinya secara sukarela di dalam suatu kegiatan partisipatif tertentu. Keyakinannya tanpa mempengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan oleh lembaga-lembaga atau oleh orang lain. Partisipasi terbujuk, yaitu bila seseorang individu mulai berpartisipasi

setelah dia diyakinkan melalui program penyuluhan atau oleh pengaruh lain sehingga berpartisipasi secara sukarela di dalam aktivitas kelompok tertentu.

Partisipasi terpaksa dapat terjadi dalam berbagai cara yaitu partisipasi terpaksa oleh hukum yang dapat terjadi bila orang-orang dipaksa melalui peraturan atau hukum. Partisipasi terpaksa karena keadaan sosial ekonomi.

Keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat mutlak harus dilakukan dalam partisipasi dan bukan hanya keterlibatan mental semata, tetapi harus disertai dengan keterlibatan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Sastropetro dalam Apriyani (2012:34), mengemukakan ada tiga buah unsur penting yang harus diperhatikan dalam melaksanakan partisipasi, yaitu :

1. Bahwa partisipasi, ikutsertaan, keterlibatan atau peranserta, sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.
2. Unsur kedua adalah kesediaan memberi suatu sumbangan kepada usaha untuk mencapai tujuan kelompok. Ini berarti, bahwa terdapat rasa kesukarelaan untuk membantu kelompok. Seseorang menjadi anggota. Diakui sebagai anggota artinya ada rasa (*sense of belongingnes*).

Partisipasi/ keterlibatan masyarakat menurut isbandi (2007:27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Masyarakat ikut serta dan berperan aktif dengan *stakeholder* untuk menjamin keberhasilan pembangunan. Partisipasi disini bisa berupa partisipasi buah pikiran atau ide, partisipasi keterampilan atau tenaga, partisipasi sosial dan partisipasi dalam pelaksanaan program.

1. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat telah disinggung sebelumnya bahwa secara sederhana partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam proses pembangunan. Pengertian tersebut dapat diartikan bahwa seseorang, kelompok, atau masyarakat dapat memberikan kontribusi/sumbangan yang sekiranya dapat menunjang keberhasilan dari sebuah proyek/program pembangunan.

Bentuk partisipasi masyarakat menurut Huraerah (2008: 102) dapat dilihat dari bentuk partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata yaitu terdiri atas :

1. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
2. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.
3. Partisipasi tenaga adalah yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
4. Partisipasi keterampilan adalah yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang

membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata (abstrak) adalah terdiri atas yaitu partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif, berikut penjelasannya :

1. Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
2. Partisipasi sosial diberikan oleh partisipasi sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.
3. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama.
4. Partisipasi representatif dilakukan dengan memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Pembangunan adalah proses partisipasi, secara lebih luas, partisipasi dipandang sebagai suatu proses yang dinamis dan berdimensi jamak. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan hanya berarti pengarahan tenaga kerja masyarakat secara sukarela, akan tetapi justru yang lebih penting adalah tergeraknya masyarakat untuk mau memanfaatkan kesempatan-kesempatan

memperbaiki kualitas hidupnya. Partisipasi berarti peranserta dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun bentuk kegiatan, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Besarnya manfaat pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat pelaku partisipasi sangat tergantung pada besar dan mutu peransertanya dalam proses pembangunan tergantung pada tingkat pemampuan serta kesempatannya untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan tersebut.

2. Peran Pemerintah dalam Pembangunan

peranan pemerintah terlihat dalam lima wujud utama yaitu sebagai berikut:

1. Selaku modernisator, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata kehidupan modern.
2. Selaku katalisator, bahwa pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional, mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi penghalang sehingga dampaknya dapat diminimalisir dan dapat mengenali faktor-faktor yang sifatnya mendorong laju pembangunan nasional sehingga mampu menarik manfaat yang sebesar-besarnya.
3. Selaku dinamisator, bahwa peran pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditujukan dengan sikap, tindak-tanduk, perilaku dan cara bekerja yang baik yang dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan.

4. Selaku stabilisator, bahwa peran pemerintah adalah stabilisator yang menjaga kestabilan nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana-rencana, program-program dan kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan dengan lancar.
5. Selaku pelopor, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusun rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.

Peran pemerintah di masa kini dan masa mendatang dalam pembangunan guna mewujudkan kesejahteraannya adalah berfungsi sebagai regulator, modernisator, katalisator/fasilitator, dinamisator dan pelopor/stimulator, yang menekan pada upaya kemandirian dalam pemberdayaan masyarakat. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam koridor persatuan Indonesia. Sebagai modernisator pemerintah berkewajiban membawa perubahan-perubahan ke arah pembaharuan masyarakat. Sebagai katalisator/fasilitator pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan. Sebagai pelopor atau stimulator, pemerintah harus mampu menunjukkan contoh-contoh nyata dan mendorong masyarakat untuk mengikuti contoh tersebut melalui tindakan nyata jika memang contoh tersebut

bermanfaat. Dari berbagai peranan pemerintah dalam pembangunan di atas ditetapkan satu tujuan yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

B. Konsep Mangrove

1. Pengertian Mangrove

Mangrove berasal dari kata mangal yang menunjukkan komunitas suatu pertumbuhan. Macnae dalam Santoso (2006), menggunakan kata mangrove untuk individu tumbuhan dan mangal komunitasnya. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang khas terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut. Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis, yang didominasi oleh beberapa spesies pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang-surut pantai berlumpur.

Mangrove merupakan suatu tipe hutan tropik dan subtropik yang khas, tumbuh disepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove banyak dijumpai di wilayah pesisir yang terlindung dari gempur ombak dan daerah yang landai. Mangrove tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai besar dan delta yang aliran airnya banyak mengandung lumpur. Sedangkan di wilayah pesisir yang tidak bermuara sungai, pertumbuhan vegetasi mangrove tidak optimal. Mangrove tidak atau sulit tumbuh di wilayah pesisir yang terjal dan berombak besar dengan arus pasang surut kuat, karena kondisi ini tidak memungkinkan terjadinya pengendapan lumpur yang diperlukan sebagai substrat bagi pertumbuhannya (Dahuri, 2003).

Ekosistem mangrove adalah bagian dari pesisir dan darat yang memiliki fungsi ekologis yang sangat kompleks, di antaranya sebagai penampung dan

pengolah limbah alami (*bioremediasi*) atau biofilter alam yang sangat efektif dalam menanggulangi pencemaran. Ekosistem mangrove juga berfungsi sebagai habitat berbagai hewan darat dan sebagai penahan intrusi garam ke darat. Yang tidak kalah penting ialah, hutan mangrove adalah bagian dari hutan tropis yang berfungsi sebagai “paru-paru” dunia.

Hutan mangrove dikenal sebagai hutan yang unik dan rumit, karena di samping tumbuhnya pada daerah peralihan antara laut dan darat, juga di dalamnya terdapat berbagai macam kehidupan biota yang saling membutuhkan dalam berbagai segi kehidupan. Mangrove dikenal sebagai hutan yang paling dinamik, karena apabila menempati daerah yang cocok, maka akan tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan substratnya.

Santoso (2006), menyatakan bahwa ruang lingkup mangrove secara keseluruhan meliputi ekosistem mangrove yang terdiri atas:

1. Satu atau lebih spesies pohon dan semak belukar yang hidupnya terbatas di habitat mangrove (*exclusive mangrove*).
2. Spesies tumbuhan yang hidupnya di habitat mangrove, namun juga dapat hidup di habitat non-mangrove (*non-exclusive mangrove*),
3. Biota yang berasosiasi dengan mangrove (biota darat dan laut, lumut kerak, cendawan, ganggang, bakteri dan lain-lain) baik yang hidupnya menetap, sementara, sekali-kali, biasa ditemukan, kebetulan maupun khusus hidup di habitat mangrove.
4. Proses-proses dalam mempertahankan ekosistem ini, baik yang berada di daerah bervegetasi maupun di luarnya.

5. Daratan terbuka atau hamparan lumpur yang berada antara batas hutan sebenarnya dengan laut.
6. Masyarakat yang hidupnya bertempat tinggal dan tergantung pada mangrove.

Menurut Bengen (2001) komunitas fauna ekosistem mangrove membentuk percampuran antara 2 (dua) kelompok:

1. Kelompok fauna daratan/teresterial yang umumnya menempati bagian atas pohon mangrove, terdiri atas: insekta, ular, primata dan burung, kelompok ini tidak mempunyai sifat adaptasi khusus hidup di dalam hutan mangrove, karena mereka melewati sebagian besar hidupnya diluar jangkauan air laut pada bagian pohon yang tinggi, meskipun mereka dapat mengumpulkan makanannya berupa hewan laut pada saat air surut
2. Kelompok fauna perairan / akuatik, terdiri atas dua tipe yaitu:
 - a. Yang hidup dikolom air, terutama berbagai jenis ikan dan udang
 - b. Yang menempati substrat baik keras (akar dan batang mangrove) maupun lunak (lumpur) terutama kepiting, kerang dan berbagai jenis invertebrate lainnya.

Menurut Wibisono (2005), secara ekologis ekosistem mangrove mempunyai beberapa fungsi penting bagi wilayah pesisir, di antaranya:

1. Sebagai tempat peralihan dan penghubung antara lingkungan darat dan lingkungan laut.
2. Sebagai penahan erosi pantai karena hampasan ombak dan angin serta sebagai pembentuk daratan baru.
3. Merupakan tempat ideal untuk berpijah (*spawing ground*) dari berbagai jenis larva udang dan ikan.

4. Sebagai cadangan sumber alam (bahan mentah) untuk dapat diolah menjadi komoditi perdagangan yang bisa menambah kesejahteraan penduduk setempat.

Manfaat sosial ekonomis ekosistem mangrove bagi masyarakat sekitarnya adalah sebagai sumber mata pencaharian dan produksi berbagai jenis hasil hutan dan turunannya, antara lain kayu bakar, arang, bahan bangunan, obat-obatan, minuman, peralatan rumah tangga, bahan baku tekstil dan kulit, madu, lilin dan tempat rekreasi (Hamilon dan Snedaker dalam Dahuri, 2001).

2. Potensi Ekowisata Mangrove

potensi rekreasi dalam ekosistem mangrove antara lain (Bahar, 2004):

- a. Bentuk perakaran yang khas yang umum ditemukan pada beberapa jenis vegetasi mangrove seperti akar tunjang (*Rhizophora* spp), akar lutu (*Bruguiera* spp), akar pasak (*Sonneratia* spp., *Avicenia* spp), akar papan (*Heritiera* spp).
- b. Hutan yang bersifat viviparous (buah berkecambah semasa masih menempel pada pohon) yang terlihat oleh beberapa jenis vegetasi mangrove seperti *Rhizophora* spp. Dan *Ceriops* spp.
- c. Adanya zonasi yang sering berbeda mulai dari pinggir pantai sampai pedalaman (transisi zonasi).
- d. Berbagai jenis fauna yang berasosiasi dengan ekosistem mangrove seperti beraneka ragam jenis burung, serangga dan primata yang hidup ditajuk pohon serta berbagai jenis fauna yang hidup di dasar mangrove seperti babi hutan, biawak, buaya, ular, udang, ikan, kerang-kerangan, keong, kepiting, dan sebagainya.

- e. Antraksi adat istiadat masyarakat setempat yang berkaitan dengan sumberdaya mangrove.
- f. Hutan-hutan mangrove yang dikelola secara rasional untuk pertambahan tumpang sari dan pembuatan garam, biasa menarik wisatawan.

Potensi ini dapat dikembangkan untuk kegiatan lintas alam, memancing, berlayar, berenang, pengamatan jenis burung dan atraksi satwa liar, fotografi, pendidikan, piknik dan berkemah, serta adat istiadat penduduk lokal yang hidupnya bergantung pada keberadaan hutan mangrove.

3. Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Hutan Mangrove

Pada sektor pembangunan yang indikator kesejahteraan adalah dengan menentukan jumlah pendapatan perkapita. Namun, dalam kaitannya dengan indikator kesejahteraan, adanya rehabilitasi hutan mangrove juga memiliki andil yang besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah sekitar hutan mangrove. Apabila pendapatan perkapita dipakai sebagai ukuran tingkat kesejahteraan maka tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan mangrove dapat dilihat melalui manfaat apa sajakah yang diberikan untuk masyarakat setelah adanya program rehabilitasi. Seperti yang dikemukakan Sobari (2006, h. 69-71), dalam konteks ini ada beberapa manfaat yaitu :

- a. Manfaat langsung, yaitu manfaat yang langsung diambil dari sumber daya. Manfaat langsung tersebut berupa manfaat usaha tambak, manfaat dari hasil kayu, manfaat penangkapan hasil perikanan.
- b. Manfaat tidak langsung, yaitu nilai yang secara tidak langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dapat berupa fisik misal hal yang mendukung

nilai guna langsung misalnya hutan mangrove sebagai penahan abrasi pantai. Selain manfaat tidak langsung berupa fisik, hutan mangrove juga memiliki manfaat biologi sebagai *nursery ground* yaitu tempat berkembang biaknya ikan yang tentunya akan menambah produktivitas hasil tangkapan nelayan.

4. Fungsi dan Manfaat Hutan Mangrove

Hutan mangrove memiliki beberapa fungsi ekosistem mangrove yang mencakup:

a. *fungsi fisik*

menjaga garis pantai agar tetap stabil, melindungi pantai dari erosi laut (abrasi) dan intrusi air laut; dan mengolah bahan limbah.

b. *Fungsi biologis*

tempat pembenihan ikan, udang, tempat pemijahan beberapa biota air; tempat bersarangnya burung; habitat alami bagi berbagai jenis biota.

c. *Fungsi ekonomi*

sebagai sumber bahan bakar (arang kayu bakar), pertambakan, tempat pembuatan garam, dan bahan bangunan.

Ekosistem mangrove baik secara sendiri maupun secara bersama dengan ekosistem padang lamun dan terumbu karang berperan penting dalam stabilisasi suatu ekosistem pesisir, baik secara fisik maupun secara biologis, disamping itu, ekosistem mangrove merupakan sumber plasma nutfah yang cukup tinggi (misal, mangrove di Indonesia terdiri atas 157 jenis tumbuhan tingkat tinggi dan rendah, 118 jenis fauna laut dan berbagai jenis fauna darat.

Disamping itu, ekosistem mangrove juga merupakan penghasil detritus dan merupakan daerah asuhan (*nursery ground*), daerah untuk mencari makan (*feeding ground*), serta daerah pemijahan (*spawning ground*) bagi berbagai jenis ikan, udang, dan biota laut lainnya. Juga sebagai pemasok larva ikan, udang, dan sebagai tempat pariwisata.

Hasil dari hutan mangrove dapat berupa kayu, bahan bangunan, chip, kayu bakar, arang kulit kayu yang menghasilkantanin (zat penyamak) dan lain-lain.Selanjutnya, juga merinci hasil-hasil produk dari ekosistem hutan mangrove berupa :

- a. Bahan bakar; kayu bakar, arang dan alkohol.
- b. Bahan bangunan; balok perancah, bangunan, jembatan, balok rel kereta api,pembuatan kapal, tonggak dan atap rumah.Tikar bahkan pagar pun menggunakan jenis yang berasal dari hutan mangrove.
- c. Makanan; obat-obatan dan minuman, gula alkohol,asam cuka, obat- obatan.
- d. Perikanan; tiang-tiang untuk perangkap ikan, pelampung jaring, pengeringan ikan, bahan penyamak jaring dan lantai.
- e. Pertanian, makanan ternak, pupuk dsb.
- f. Produksi kertas; berbagai macam kertas

Manfaat ekonomis diantaranya terdiri atas hasil berupa kayu (kayu bakar, arang, kayu konstruksi) dan hasil bukan kayu (hasil hutan ikutan dan pariwisata). Manfaat ekologis, yang terdiri atas berbagai fungsi lindungan baik bagi lingkungan ekosistem daratan dan lautan maupun habitat berbagai jenis fauna, diantaranya :

- Sebagai proteksi dari abrasi/erosi, gelombang atau angin kencang
- Pengendali intrusi air laut
- Habitat berbagai jenis fauna
- Sebagai tempat mencari makan, memijah dan berkembang biak berbagai jenis ikan dan udang
- Pembangun lahan melalui proses sedimentasi
- Pengontrol penyakit malaria
- Memelihara kualitas air (mereduksi polutan, pencemar air)
- Penyerap CO₂ dan penghasil O₂ yang relatif tinggi dibanding tipe hutan lain.

5. Penyebab Rusaknya Mangrove

Seperti kita ketahui, hutan mangrove merupakan tipe ekosistem peralihan darat dan laut yang mempunyai multi fungsi, yaitu selain sebagai sumberdaya potensial bagi kesejahteraan masyarakat dari segi ekonomi, sosial juga merupakan pelindung pantai dari hempasan ombak. Oleh karena itu dalam usaha pengembangan ekonomi kawasan mangrove seperti pembangkit tenaga listrik, lokasi rekreasi, pemukiman dan sarana perhubungan serta pengembangan pertanian pangan, perkebunan, perikanan dan kehutanan harus memperimbangan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya wilayah pesisir. Perumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan tutunan untuk mendayagunakan sumber daya mangrove yang terus meningkat. Secara garis besar ada dua faktor penyebab kerusakan hutan mangrove, yaitu :

1. Faktor manusia

yang merupakan faktor dominan penyebab kerusakan hutan mangrove dalam hal pemanfaatan lahan yang berlebihan.

2. Faktor alam, seperti : banjir, kekeringan dan hama penyakit, yang merupakan faktor penyebab yang relatif.

Faktor-faktor yang mendorong aktivitas manusia untuk memanfaatkan hutan mangrove dalam rangka mencukupi kebutuhannya sehingga berakibat rusaknya hutan, antara lain :

- a. Keinginan untuk membuat pertambakan dengan lahan yang terbuka dengan harapan ekonomis dan menguntungkan, karena mudah dan murah.
- b. Kebutuhan kayu bakar yang sangat mendesak untuk rumah tangga, karena tidak ada pohon lain di sekitarnya yang bisa ditebang.
- c. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan berbagai fungsi hutan mangrove.
- d. Adanya kesenjangan sosial antara petani tambak tradisional dengan pengusaha tambak modern, sehingga terjadi proses jual beli lahan yang sudah tidak rasional.

Kerusakan ekosistem mangrove dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain :

1. Kurang dipahaminya kegunaan ekosistem mangrove.
2. Tekanan ekonomi masyarakat miskin yang bertempat tinggal dekat atau sebagai bagian dari ekosistem mangrove.
3. Karena pertimbangan ekonomi lebih dominan daripada pertimbangan lingkungan hidup.

Permasalahan yang terdapat di kawasan hutan mangrove yang berkaitan dengan upaya kelestarian fungsinya adalah :

1. Pemanfaatan Ganda Yang Tidak Terkendali.

Pemanfaatan ganda antar berbagai sektor dan Penggunaan sumberdaya yang berlebihan telah menyebabkan terjadi pengikisan pantai oleh air laut. Sesuai dengan fungsi hutan mangrove sebagai penahan ombak. Di beberapa daerah kawasan pantai hutan mangrove sudah banyak yang hilang sehingga lahan pantai terkikis oleh ombak. Di wilayah Teluk Jakarta pemanfaatan yang ada sekarang saling berkompetisi, seperti perluasan areal pelabuhan, industri, transportasi laut, permukiman dan kehutanan. Demikian juga di Bali, khususnya di kawasan hutan mangrove Suwung, pembangunan landasan udara Ngurah Rai Bali menyebabkan pantai Kuta terabrasi. Pemanfaatandemikian yang kurang menguntungkan ditinjau dari aspek keseimbangan lingkungan, karena dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan wilayah pesisir. Disamping itu, pengelolaan hutan mangrove belum berkembang, baik dalam hal silvikultur, sumberdaya manusia, kelembagaan, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. Akibatnya banyak terjadi perusakan hutan mangrove seperti penebangan yang tidak terkendali, sehingga pemanfaatannya melampaui kemampuan sumberdaya alam untuk meregenerasi.

2. Permasalahan Tanah Timbul Akibat Sedimentasi Yang Berkelanjutan.

Di daerah muara sungai banyak dijumpai tanah timbul karena endapan lumpur yang terus-menerus terbawa dari daerah hulu sungai. Permasalahan utama yang muncul adalah tentang status tanah timbul tersebut. Karena lokasinya umumnya berdekatan dengan lahan kehutanan, maka sering terjadi status penguasaannya langsung menjadi kawasan hutan, walaupun oleh masyarakat setempat dimanfaatkan untuk kepentingan mereka, tanpa

mengindahkan status tanahnya. Hal ini sering menimbulkan konflik penguasaan. Contoh : kasus kawasan di Segara Anakan, dan kawasan Pantura Jawa, kawasan Sulawesi Selatan dan lain-lain.

3. Konversi Hutan Mangrove.

Hampir semua bentuk pemanfaatan lahan di wilayah pesisir berasal dari konversi hutan mangrove. Hutan mangrove sepanjang pantai utara Jawa, Bali Selatan dan Sulawesi Selatan bagian barat telah dikonversi menjadi kawasan permukiman, tambak, kawasan industri, pelabuhan, lading garam dan lain-lain. Kebanyakan konversi hutan mangrove menjadi bentuk pemanfaatan lain belum banyak ditata berdasarkan kemampuan dan peruntukan pembangunan, sehingga menimbulkan kondisi yang kurang menguntungkan dilihat dari manfaat regional dan nasional. Oleh karena itu pemanfaatan hutan mangrove yang tersisa atau upaya rehabilitasinya harus sesuai dengan potensi dan rencana pemanfaatan yang lainnya dengan mempertimbangkan kelestarian ekosistem, manfaat ekonomi dan penguasaan teknologi

4. Permasalahan Sosial Ekonomi.

Meningkatkannya pertumbuhan penduduk dan laju pembangunan di wilayah pesisir, khususnya Jawa, Bali, Sulawesi dan Lampung menyebabkan timbulnya ketidakseimbangan antara permintaan kebutuhan hidup, kesempatan dengan persediaan sumber daya alam pesisir yang ada. Upaya pengembangan pertanian intensif (*coastalagriculture*), dan kegiatan serta kesempatan yang berorientasi kelautan masih terbatas dikembangkan. Di pantai utara Jawa, hampir semua hutan mangrove telah habis dirombak menjadi kawasan

pemukiman, perhotelan, tambak dan sawah yang berorientasi kepada ekosistem daratan. Pemanfaatan sumber daya alam wilayah pesisir mestinya tidak hanya terbatas pada hutan mangrove atau tambak saja tapi juga eksploitasi terumbu karang yang telah melampaui batas, sehingga sulit dapat pulih kembali. Hal ini terjadi di Bali Selatan, pantai utara Jawa Tengah.

5. Permasalahan Kelembagaan dan Pengaturan Hukum Kawasan Pesisir dan Lautan.

Sering terjadi tumpang tindih, konflik dan ketidakjelasan kewenangan antara instansi sektoral pusat dan daerah. Hal tersebut menyebabkan simpang siur tanggung jawab dan prosedur perizinan untuk kegiatan pembangunan pesisir dan lautan. Contohnya seperti pembukaan lahan di kawasan pesisir, usaha penggalian pasir laut, reklamasi, penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang dan lain-lain. Akibat tersebut menyebabkan terus meningkatnya kerusakan ekosistem kawasan pesisir dan lautan khususnya kawasan hutan mangrove.

6. Upaya Pengembangan Mangrove

Ekosistem mangrove yang rusak dapat dipulihkan dengan cara restorasi / rehabilitasi. Restorasi dipahami sebagai usaha mengembalikan kondisi lingkungan kepada kondisi semula secara alami. Campur tangan manusia diusahakan sekecil mungkin terutama dalam memaksakan keinginan untuk menumbuhkan jenis mangrove tertentu menurut yang dipahami/diingini manusia. Dengan demikian, usaha restorasi semestinya mengandung makna memberi jalan/peluang kepada alam untuk mengatur/memulihkan dirinya sendiri. Kita manusia pelaku mencoba membuka jalan dan peluang serta mempercepat proses

pemulihan terutama karena dalam beberapa kondisi, kegiatan restorasi secara fisik akan lebih murah dibanding kita memaksakan usaha penanaman mangrove secara langsung.

Restorasi perlu dipertimbangkan ketika suatu sistem telah berubah dalam tingkat tertentu sehingga tidak dapat lagi memperbaiki atau memperbaharui diri secara alami. Dalam kondisi seperti ini, ekosistem homeastatis telah berhenti secara permanen dan proses normal untuk suksesi tahap kedua atau perbaikan secara alami setelah kerusakan terhambat oleh berbagai sebab. Secara umum, semua habitat bakau dapat memperbaiki kondisinya secara alami dalam waktu 15 - 20 tahun jika kondisi normal hidrologi tidak terganggu, dan ketersediaan biji dan bibit serta jaraknya tidak terganggu atau terhalangi. Jika kondisi hidrologi adalah normal atau mendekati normal tetapi biji bakau tidak dapat mendekati daerah restorasi, maka dapat direstorasi dengan cara penanaman. Oleh karena itu habitat bakau dapat diperbaiki tanpa penanaman, maka rencana restorasi harus terlebih dahulu melihat potensi aliran air laut yang terhalangi atau tekanan-tekanan lain yang mungkin menghambat perkembangan bakau.

Tanaman kehutanan dikombinasikan dengan pertambakan ikan atau udang disebut *silvofishery*. Tujuan kegiatan Perhutanan Sosial di hutan mangrove ini sama halnya dengan di kawasan hutan produksi, yaitu : untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan memelihara ekosistem hutan mangrove. Hal ini dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan teknis dan non teknis.

C. Pelaksanaan Pengembangan Mangrove

Usaha pemulihan ekosistem mangrove di beberapa daerah, baik di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, maupun Irian Jaya telah sering kita lihat. Upaya ini biasanya berupa proyek yang berasal dari Departemen Kehutanan ataupun dari Pemerintah daerah setempat. Namun hasil yang diperoleh relatif tidak sesuai dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Padahal dalam pelaksanaannya tersedia biaya yang cukup besar, tersedia tenaga ahli, tersedia bibit yang cukup, pengawasan cukup memadai, dan berbagai fasilitas penunjang yang lainnya. Mengapa hasilnya kurang memuaskan? Salah satu penyebabnya adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam ikut terlibat upaya pengembangan wilayah, khususnya rehabilitasi hutan mangrove dan masyarakat masih cenderung dijadikan obyek, bukan subyek dalam upaya pembangunan (Subing, 2000).

Pelaksanaan pemulihan ekosistem mangrove yang telah terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini dilakukan atas perintah dari atas. Seperti suatu kebiasaan dalam suatu proyek apapun yang namanya rencana itu senantiasa datangnya dari atas; sedangkan bawahan (masyarakat) sebagai ujung tombak pelaksana proyek hanya sekedar melaksanakan perintah. Pelaksanaan proyek semacam ini tentu saja kurang memberdayakan potensi masyarakat, padahal idealnya masyarakat tersebutlah yang harus berperan aktif dalam upaya pemulihan ekosistem mangrove tersebut, sedangkan pemerintah hanyalah sebagai penyedia dana, pengontrol, dan fasilitator berbagai kegiatan yang terkait. Akibatnya setelah selesai proyek tersebut, yaitu saat dana telah habis tentu saja pelaksanaan proyek tersebut juga merasa sudah habis pula tanggung jawabnya.

Masyarakat tidak merasa ikut memiliki (*sense of belonging* tidak tumbuh) hutan mangrove tersebut. Begitu pula, seandainya hutan mangrove tersebut telah menjadi besar, maka masyarakat merasa sudah tidak ada lagi yang mengawasinya, sehingga mereka dapat mengambil atau memotong hutan mangrove tersebut secara bebas. Masyarakat beranggapan bahwa hutan mangrove tersebut adalah milik pemerintah dan bukan milik mereka, sehingga jika masyarakat membutuhkan mereka tinggal mengambil tanpa merasa diawasi oleh pemerintah atau pelaksana proyek. Begitulah pengertian yang ada pada benak masyarakat pesisir yang dekat dengan hutan mangrove yang telah mereka rehabilitasi.

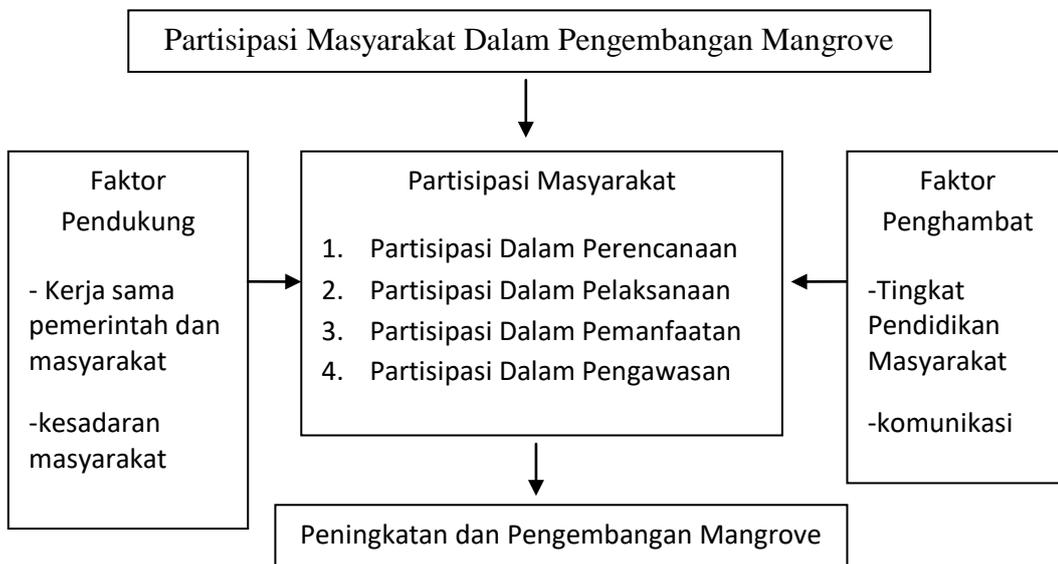
Upaya pemulihan ekosistem mangrove adalah atas biaya pemerintah, sedangkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi keberhasilan dan pemanfaatannya secara berkelanjutan semuanya dipercayakan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut dapat juga melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersama perangkat desa, pemimpin umat, dan lain-lain. Masyarakat pesisir secara keseluruhan perlu mendapat pengertian bahwa hutan mangrove yang akan mereka rehabilitasi akan menjadi milik masyarakat dan untuk masyarakat, khususnya yang berada di daerah pesisir. Dengan demikian semua proses rehabilitasi atau reboisasi hutan mangrove yang dimulai dari proses penanaman, perawatan, penyulaman tersebut dilakukan oleh masyarakat. Melalui mekanisme ini, masyarakat tidak merasa dianggap sebagai “kuli”, melainkan ikut memiliki hutan mangrove tersebut, karena mereka merasa ikut merencanakan penanaman dan lain-lain.

Masyarakat merasa mempunyai andil dalam upaya rehabilitasi hutan mangrove tersebut, sehingga status mereka akan berubah, yaitu bukan sebagai kuli lagi melainkan ikut memilikinya. Dari sini akan tergambar andaikata ada sekelompok orang yang bukan anggota masyarakat yang ikut menanam hutan mangrove tersebut ingin memotong sebatang tumbuhan mangrove saja, maka mereka tentu akan ramai-ramai mencegah atau mengingatkan bahwa mereka menebang pohon tanpa ijin. Ini merupakan salah satu contoh kasus kecil dalam perusakan hutan mangrove yang telah dihijaukan, kemudian dirusak oleh anggota masyarakat lainnya yang bukan anggota kelompoknya.

D. Kerangka Pikir

Pengembangan program mangrove akan kurang berarti apabila masyarakat lokal itu sendiri tidak ikut berpartisipasi dalam sektor Pengembangan Mangrove di Pulau Tanakeke. Partisipasi dari masyarakat menurut Hetifah S.J. Soemarto (2003) terdiri dari beberapa indikator yakni, (1) Partisipasi Dalam Perencanaan, (2) Partisipasi Dalam Pelaksanaan, (3) Partisipasi Dalam Pemanfaatan, (4) Partisipasi Dalam Pengawasan Serta, adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Partisipasi masyarakat merupakan langkah awal untuk membangun kerjasama antara pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai pendorong suksesnya kebijakan tersebut dalam rangka pengembangan Mangrove. Berikut kerangka pikir seperti yang akan digambarkan di bawah ini.

Bagan Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Mangrove terdiri atas tiga indikator antara lain : (1) Partisipasi Dalam Perencanaan, (2) Partisipasi Dalam Pelaksanaan, (3) Partisipasi Dalam Pemanfaatan, (4) Partisipasi Dalam Pengawasan, disertai dengan faktor pendukung dan faktor penghambat.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Partisipasi dalam Perencanaan

Dalam tahap perencanaan ini diukur dengan melihat jumlah kehadiran warga dalam mengikuti sosialisasi sebelum adanya kegiatan penanaman mangrove serta keaktifan dalam memberikan berbagai usulan maupun pendapat dalam rapat

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ini, partisipasi masyarakat dilihat dalam melakukan kegiatan penanaman mangrove tersebut, baik atas inisiatif individu, kelompok maupun yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan ini indikator yang digunakan adalah frekuensi dalam pelaksanaan kegiatan inisiatif kegiatan dan kemauan untuk mencapai keberhasilan.

3. Partisipasi dalam Pemanfaatan

Dalam tahap pemanfaatan ini hasil pengembangan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pengembangan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pengembangan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pengembangan mangrove yang akan datang

4. Partisipasi dalam Pengawasan

Kegiatan pengawasan ini sangat diperlukan, bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan, dalam hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan pembangunan sangat diperlukan.

5. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengembangan mangrove di Desa Mattiro Baji di Pulau Tanakeke Kabupaten Takalar.

6. Peningkatan dan Pengembangan Mangrove, Pengembangan Mangrove dalam pengembangannya yang semakin meningkat diharapkan didukung dalam

fasilitas dan kesadaran masyarakat yang tinggi dengan tidak mengesampingkan aspek ekologi sebagai kawasan konservasi mangrove.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama dua bulansesudah seminar proposal. Sedangkan penelitian ini berlokasi di Desa Mattiro Baji Kecamatan Mappakasunggu Pulau Tanakeke di Kabupaten Takalar. Adapun alasan penulis memilih Pulau Tanakeke sebagai lokasi penelitian karena Pulau Tanakeke merupakan salah satu pulau yang memiliki potensi sumber daya alam yang luas terutama dibidang nelayan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha menggunakan narasi dari informan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Mangrove di Desa Mattiro Baji Kecamatan Mappakasunggu Pulau Tanakeke di Kabupaten Takalar.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan dan menggambarkan pengalaman para informan dalam kaitannya dengan pengembangan mangrove. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Mangrove di Desa Mattiro Baji Kecamatan Mappakasunggu Pulau Tanakeke di Kabupaten Takalar.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini setidaknya ada 2 sumber data yang dipergunakan, yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan informan, yaitu kepada orang-orang yang mengetahui lebih mendalam tentang topik penelitian secara akurat dan mampu mewakili kelompok dalam membahas kegiatan pengembangan mangrove.
2. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain atau sumber yang telah dipublikasikan dapat berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan kepustakaan yang berhubungan dengan pengembangan mangrove.

D. Informan Penelitian

Dalam menentukan informan maka peneliti menggunakan metode purposive sampling dimana teknik menentukan sampel dengan sengaja dipilih. Informan adalah orang diharapkan memberikan data secara obyektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun informan yang akan peneliti wawancarai adalah sebagai berikut:

No	Nama	inisial	Jabatan	Ket
1	Hadi Wijaya	HW	Kabid Kehutanan	1 Orang
2	Djamaluddin Dg.ngerang	DN	Kepala Desa Mattiro Baji	1 Orang
3	Narsia Dg. Senge	NS	Tokoh Masyarakat	1 Orang
4	Dg. Lahi	DL	Tokoh Masyarakat	1 Orang
5	Dg. Kebo	DK	Masyarakat	1 Orang
6	Dg. Serang	DS	Masyarakat	1 Orang
7	Dg. Tunru	DT	Masyarakat	1 Orang
Jumlah Informan				7.Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang diperlukan, yaitu:

1. Observasi

Teknik observasi yaitu penulis melakukan pengamatan dan pencatatan langsung yang sistematis terhadap objek Pengembangan Mangrove di Desa Mattiro Baji Kecamatan Mappakasunggu di Pulau Tanakeke di Kabupaten Takalar untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian yang di ajukan.

2. Wawancara

Teknik wawancara mendalam yang dilakukan dengan interview atau tanya jawab kepada 7 orang informan mengenai hal yang berhubungan dengan Pengembangan Mangrove di Desa Mattiro Baji Kecamatan Mappakasunggu Pulau Tanakeke di Kabupaten Takalar.

3. Dokumentasi

Teknik yang digunakan peneliti untuk mengetahui secara konseptual tentang permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti dengan membaca literature khususnya yang berhubungan dengan Mangrove dan dokumen lainnya yang menyangkut tentang Pengembangan Mangrove.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis yang data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis

interaktif dalam model ini terdapat komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012) komponen tersebut yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuanghal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penulis dapat dilakukan.

3. Sajian data

Sajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat agar makna peristiwanya menjadi lebih baik dan mudah dipahami.

G. Pengabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data dengan cara triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Sugiyono (2009) membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yaitu:

- a. Trianggulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Trianggulasi teknik yaitu teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c. Trianggulasi waktu yaitu menguji kredibilitas data pada waktu yang berbeda, karena waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Pulau Tanakekeh Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar terletak sepanjang pesisir pantai Barat Selat Makassar sampai dengan pesisir pantai selatan Laut Flores dengan jarak tempuh dari kota Makassar sepanjang 40 Km yang secara astronomis terletak di $119^{\circ} 10' 58.8216''$ sampai $119^{\circ} 38' 20.2056''$ dan $-5^{\circ} 36' 37.7568''$ sampai $-5^{\circ} 12' 40.5684''$, dengan luas wilayah 65.470 Ha dan keliling 282,7 Km.

Kabupaten Takalar memiliki batas wilayah kabupaten antara lain:

1. Sebelah Utara dengan kota Makassar dan Kabupaten Gowa
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Gowa
3. Sebelah Selatan dengan Laut Flores
4. Sebelah Barat dengan Selat Makassar.

Kabupaten Takalar mempunyai 7 kecamatan, 18 kelurahan dan desa 55 buah, sedangkan desa swakarsa 40 buah dan desa swasembada 33 buah.

Pulau Tanakeke yang terletak di Kecamatan Mangarombang sebagai lokasi penelitian secara astronomis terletak di $119^{\circ} 14' 10.8096''$ sampai $119^{\circ} 18' 49.0932''$ dan $-5^{\circ} 32' 17.3256''$ sampai $-5^{\circ} 27' 12.3696''$ dengan luas wilayah 4.312 Ha dan memiliki panjang keliling 63.67 Km terbagi menjadi dua Desa yaitu Desa Maccini Baji dan Desa Mattiro Baji. Menurut data kecamatan Mangarombang tahun 2007 untuk Pulau Tanakeke memiliki jumlah penduduk \pm 6.000 jiwa.

2. Profil Kecamatan Mappakasunggu Desa Mattiro Baji

Kecamatan Mappakasunggu merupakan salah satu dari 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar. Berada di kawasan Sulawesi Selatan dengan jarak kurang lebih 51 km dari kota Makassar. Terletak pada posisi antar 5° 27' 52" Lintang Selatan dan 119° 25' 33" Bujur Timur.

Ibukota Mappakasunggu terletak di kelurahan Takalar yang sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan sanrobone, sebelah Timur berbatasan Kecamatan pattallassang sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Mangarabombang, serta sebelah barat berbatasan dengan selatan Makassar.

Luas Kecamatan Mappakasunggu 45.27 km² atau kurang lebih 7,99 % dari luas total luas Kabupaten Takalar, Yang memiliki 9 Desa /Kelurahan yang terdiri dari daratan dan pulau.

Secara administratif Pulau Bauluang merupakan salah satu dusun yang berada di bawah Pemerintahan Desa Mattiro Baji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan. Berada dalam lingkup Kepulauan Tanakeke dan terdiri dari enam pulau/dusun dalam wilayah Desa Mattiro Baji yaitu : Pulau Satangga, Dusun Lantangpeo, Dusun Labbutallua, Pulau Rewataya, Dusun Kalukuang, Pulau Dayang-dayangan, dan Pulau Bauluang sendiri. Adapun batas-batas wilayah Pulau Bauluang sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bontonombo
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Polombangkeng Selatan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Manggarabombang

Sedangkan secara geografis Pulau Bauluang berada posisi 5o26'48" LS - 5o27'41" LS dan 119o13'50" BT - 119o14'11" BT. Bentuk pulau memanjang dari utara ke selatan di mana pada sisi barat pulau ditumbuhi oleh mangrove yang tebal dan lebat. Sisi timur terbuka dari pengaruh angin timur dan pada sisi ini dijadikan wilayah pemukiman oleh penduduk sepanjang garis pantai. Pada sisi ini terdapat hamparan terumbu karang yang memanjang dari utara ke selatan dengan lebar reef flat antara 200-400 m. Pada sisi timur pulau ditumbuhi oleh spot-spot mangrove yang tipis dan padang lamun di sepanjang reef flat. Di daerah slope, terumbu karang umumnya landai hingga kedalaman 8-10 m.

Pulau Bauluang dapat dicapai melalui jalur angkutan laut dari daratan pantai Kabupaten Takalar (muara sungai sekitar Kec. Mappakasunggu–Takalar Lama), dengan waktu sekitar 2 jam. Kapal angkutan laut yang relatif besar, setiap harinya beroperasi reguler dari dan ke Dusun Tompotana–Pulau Tanakeke. Dusun lokasi tersebut ke pulau-pulau sekitarnya (termasuk Pulau Bauluang) dilanjutkan dengan angkutan kapal yang relatif lebih kecil. Perjalanan lanjutan dari Dusun Tompotana-Tanakeke ke Pulau Bauluang membutuhkan waktu tempuh sekitar setengah jam.

3. Jumlah Penduduk

Kepadatan penduduk Kecamatan Mappakasunggu sekitar 3 jiwa perkilometer persegi dengan jumlah rumah tangga sebanyak 3682 rata-rata anggota rumahtangga adalah 4,27 artinya setiap rumah tangga rata-rata empat jiwa.

Tabel 1. Indikator kependudukan di Desa Matiro baji Pulau Bauluang Kecamatan Mappakasunggu Tanah Keke Kabupaten Takalar

Indikator	2011	2012	2013
Jumlah penduduk (000 jiwa)	15.291	15.444	15.757
Pertumbuhan Penduduk (%)	1,00	1,00	2,02
Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)	338	341	348
Sex Ration(%)	89,98	90,00	89,00
Jumlah Rumah Tangga (000 juta)	3.417	3.612	3.682
Rata-rata ART (Jiwa/juta)	4	4	4

Sumbe :BPS Kab.Takalar dikutip dari Kecamatan Mappakasunggu Dalam Angka 2011-2013

Penduduk di Kecamatan Mppakasunggu setiap tahunnya meningkat dimana didominasi oleh Takalar kota sebanyak 4134 jiwa atau sekitar 26% dari total penduduk kecamatan mappakasunggu.

Tabel 2.Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Matiro baji Kecamatan Mappakasunggu Tanakeke Kabupaten Takalar.

Persentase Penduduk Kecamatan Mappakasunggu Menurut Jenis Kelamin			
Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2011	7 283	8 053	15 291
2013	7 317	8 127	15 444
2012	7 454	8 303	17 757

Sumber:Mappakasunggu 2014.

4. Mata Pencaharian

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Kecamatan Mappakasunggu adalah bekerja di sektor pertanian tanaman padi dan jagung. Luas panen di Kecamatan Mappakasunggu tahun 2013 sebesar 277 ha , peroduksi 1 504.6 ton atau rata-rata produktivitasnya 54,32 Kg/ha. Sedangkan jagung luas panen tahun 2013 sebesar 82 ha produksinya 57,28ha.

5. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kemampuan pola pikir masyarakat dalam mengembangkan usahanya terutama dalam pemanfaatan ekonomi di hutan mangrove untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Semakin tinggi tingkat pendidikan formal yang diperoleh masyarakat semakin tinggi pula tingkat pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola hutan mangrove. Tingkat pendidikan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 3.

Jumlah Murid, Guru dan Rasio Murid di Desa Matiro baji Kecamatan Mappakasunggu Tanakeke Kabupaten Takalar.

Jumlah Murid, Guru dan Rasio Murid Terhadap Guru Tahun 2013				
NO	Jumlah Pendidikan	Jumlah Murid(Orang)	Jumlah Guru(Orang)	Rasio Murid Terhadap Guru(%)
1	SD/Sederajat	2.652	334	7,94
2	SLTP/Sederajat	1.010	155	6,51
3	SLTA/Sederajat	173	20	8,65
Jumlah		3.835	509	7,53

Sumber : UPTD Dkjar Kecamatan Mappakasunggu Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 3. Diatas diketahui bahwa SD sebanyak 2.652orang dan SMP sebanyak 1.010orang, SMA sebanyak 173 orang. Tingkat pendidikan responden yang paling banyak adalah SD. Jumlah sarana dan prasarana sekolah yang ada di Desa Mattiro Baji sedikit. Di desa ini terdapat 1 bangunan Sekolah Dasar (SD), dan 1 bangunan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Kurangnya minat anak-anak ingin sekolah atau faktor jauhnya sarana sekolah menengah atas (SMA) dari pulau baulung dan tidak adanya pengetahuan atau dorongan kepada orang tua untuk menyekolahkan anaknya kebangku kuliah menyebabkan di Pulau Bauluang ini tidak ada sarjana.

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Mangrove Di Desa Mattiro Baji Kecamatan Mappakasunggu Pulau Tanakeke Di Kabupaten Takalar.

Partisipasi masyarakat di Desa Mattiro Baji dalam pengembangan Mangrove terdiri dari indikator antara lain : (1). Partisipasi dalam Perencanaan, (2). Partisipasi dalam Pelaksanaan, (3). Partisipasi dalam Pemanfaatan, (4). Partisipasi dalam Pengawasan.

1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pengembangan Mangrove

Perencanaan merupakan proses yang mempersiapkan seperangkat keputusan untuk melakukan tindakan di masa depan. Tahap perencanaan merupakan tahapan awal dalam proses pelaksanaan pengelolaan mangrove. Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan akan memberikan arah, langkah atau pedoman proses pengembangan mangrove. Pada tahapan ini akan ditelusuri aktivitas atau kegiatan yang dilakukan masyarakat, dimulai dari keterlibatan mereka dalam rencana program dalam pembangunan pengelolaan mangrove.

Partisipasi masyarakat di Desa Mattiro Baji Kecamatan Mappakasunggu dalam perencanaan pengembangan mangrove dapat dilihat dari dua aspek antara lain : (a) mengikuti sosialisasi dan (b) memberikan usulan dan pendapat.

a. Mengikuti Sosialisasi

Ketertiban masyarakat pada tahap sosialisasi diukur dari seberapa sering mereka mendengar dan mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, swasta maupun pihak lain. Semakin sering mengikuti program sosialisasi maka semakin tinggi partisipasinya pada kegiatan pengembangan mangrove.

Masyarakat menyatakan bahwa mereka pernah mengikuti kegiatan sosialisasi tentang rencana pengembangan mangrove yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah. Salah satu masyarakat mengemukakan pendapatnya tentang sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah :

“saya dan masyarakat desa yang lain selalu di undang untuk menghadiri pertemuan di kantor desa yang membahas tentang pengembangan daerah Desa Mattiro Baji, salah satunya adalah program pengembangan Mangrove.”(WawancaraDS. 05 October 2016)

Sebuah program yang berkaitan dengan kebijakan publik akan berjalan dengan baik dan efektif di perlukan sosialisasi berupa pengertian yang baik dan tepat kepada masyarakat tentang pentingnya program ini dijalankan, agar mendapat dukungan sepenuhnya dari seluruh elemen masyarakat. selaku tokoh masyarakat menyatakan bahwa :

“...Kami segenap tokoh masyarakat mencoba mengajak warga disini disini untuk bagaimana memberi perhatian lebih dalam pengembangan kawasan mangrove.”(wawancara DL. 05 October 2016)

Setiap sosialisasi pengembangan mangrove ada yang lebih pentingnya yakni pelestarian lingkungan dan pengembangan mangrove. Kabid Kehutanan juga memberikan tanggapan sebagai berikut :

“ kawasan Mangrove merupakan suatu kawasan yang mempunyai potensi yang sangat besar dan bermanfaat bagi masyarakat di Desa Mattiro Baji, hal ini lebih banyak saya yakini setelah mengikuti berbagai pertemuan maupun seminar, dimana perlu adanya pengembangan daerah untuk pemberdayaan masyarakat sekitar baik secara sosial maupun ekonomi dengan tetap menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan. Pengembangan dan pengelolaan Mangrove saya harapkan akan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” (Wawancara HW, 25 september 2016).

Pengembangan Mangrove pada dasarnya adalah memajukan masyarakat yang mengelolah mangrove dengan berbasis pada keutuhan dan kelestarian alam dengan memberdayakan masyarakat sekitarnya. Berkaitan dengan pelestarian lingkungan di Desa Mattiro Baji. Salah satu Tokoh masyarakat berpendapat bahwa :

“...kami selaku kelompok penyuluh melakukan rehabilitasi dengan penanaman mangrove secara terus menerus selama itu kami juga melakukan perawatan mangrove agar dapat tumbuh dengan baik, jadi konservasi yang dilakukan oleh masyarakat disini, itu masing-masing melindungi atau menjaga wilayahnya yang telah ditanami mangrove disetiap kapling yang dimiliki.”(Wawancara NS, 07 October 2016).

Pendapat lain yang berkaitan dengan pentingnya kelestarian lingkungan dalam kegiatan pengembangan Mangrove. Bapak kepala desaberpendapat bahwa :

“Dalam merehabilitasi saya selaku pemerintah desa setempat menghimbau masyarakat agar melakukan perawatan hutan mangrove jika ada yang mengalami kerusakan atau mati maka dilakukan penanaman kembali agar hutan mangrove ini terjaga dengan baik. Saya selalu mengajak masyarakat di Desa Mattiro Baji untuk mengadakan rapat tentang perencanaan pengembangan Mangrove. Pengembangan Mangrove pada dasarnya perlu dilaksanakan dengan berbasis kepada pelestarian alam, hal ini tidak hanya menjadi suatu kewajiban, tetapi juga harus menjadi kebutuhan bagi masyarakat.” (Wawancara DN, 07 October 2016).

Ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam mengikuti sosialisasi program pengembangan mangrove dan konservasi ini cukup tinggi, yang berarti pula mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan mangrove dapat dikatakan tinggi. Kehadiran pejabat-pejabat baik pada kunjungan kedinasan maupun pada hari libur memberi kesan positif terhadap pengembangan desa

b. Memberikan usulan dan pendapat.

Partisipasi masyarakat di Desa Mattiro Baji dalam perencanaan pengembangan dan pengelolaan mangrove diwujudkan dengan memberikan usulan-usulan dan pendapat yang dilandasi oleh keyakinan bahwa daerahnya memiliki keindahan alam daerah pesisir yang perlu dilestarikan dan dikembangkan menjadi obyek wisata yang akan menambah kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui dari pernyataan dari masyarakat bahwa :

“saya ini cuma orang biasa yang tidak mempunyai jabatan ataupun pangkat dalam masyarakat tetapi saya selalu berusaha untuk menuangkan usulan-usulan saya dalam setiap rapat baik di tingkat Desa maupun Kecamatan. Hal ini saya yakini di Desa Mattiro Baji ini mempunyai potensi keindahan alam yang harus dilestarikan serta dikembangkan sebagai daerah wisata.”(Wawancara DT, 07 October 2016).

Desa Mattiro Baji sangat kurang organisasi yang mewadahi semua kegiatan warga. Sehingga hal-hal ini menjadi dasar keperluan warga tidak tersalurkan atau tidak tersampaikan sepenuhnya. Dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Berikut wawancara salah satu Tokoh Masyarakat :

“ Disini sulit sekali mengetahui apa saja yang dibutuhkan oleh warga. Soalnya mereka tidak tahu mau kemana menyampaikan jika ada masalah yang timbul. Sementara tidak ada yang bisa mewakili mereka untuk menyampaikan keluhan warga. Sehingga jika ada masalah, warga cenderung terdiam saja.” (Wawancara DL, 05 October 2016).

Pengembangan Mangrove tersebut juga melibatkan masyarakat yang lain seperti yang di ungkapkan oleh salah satu masyarakat yaitu :

“minimnya sumbangsi pemikiran di Desa Mattiro Baji banyak disebabkan oleh kurangnya warga yang mempunyai latar pendidikan yang memadai. Sehingga sulit membentuk sebuah organisasi di Lingkungan itu sendiri. Sehingga tidak ada wadah untuk mengasah kemampuan serta kreativitas warga dalam pengembangan taraf hidupnya.” (Wawancara DK, 07 October 2016).

Pengembangan dan pengelolaan mangrove pada dasarnya adalah memajukan pelestarian mangrove dengan berbasis pada keutuhan dan kelestarian alam dengan memberdayakan masyarakat sekitarnya. Berkaitan dengan pentingnya pengembangan mangrove dan kelestarian lingkungan alam dalam kegiatan pembangunan daerah di Desa Mattiro Baji.

Berkaitan dengan tingkat partisipasinya dalam perencanaan pengembangan Mangrove, kepala desa memberikan pernyataan sebagai berikut :

“saya menangani pengembangan mangrove di Desa Mattiro Baji, khususnya pengelolaan mangrove dan melestarikannya. Desa Mattiro Baji sebetulnya memiliki banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan terutama pengembangan mangrove. Beberapa kelompok penyuluh melakukan penanaman mangrove pada saat air laut surut. Masyarakat di Desa Mattiro Baji termasuk dalam daerah pengembangan mangrove. (Wawancara DN, 07 October 2016).

Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan dan pengelolaan Mangrove adalah memberikan usulan, pendapat dalam rapat yang di ikuti, hal ini sesuai dengan pendekatan partisipasi oleh Dusseldrop yaitu bentuk partisipasi yang bebas yang termasuk dalam kategori partisipasi terbujuk dimana masyarakat mempunyai keyakinan setelah adanya program penyuluhan dari pemerintah yaitu melalui dinas pertanian dan kehutanan.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan Pengembangan Mangrove

Dalam tahap pelaksanaan pengembangan mangrove, partisipasi masyarakat dilihat dalam melakukan kegiatan penanaman mangrove tersebut, baik atas inisiatif individu, kelompok maupun yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan ini indikator yang digunakan adalah frekuensi dalam pelaksanaan kegiatan inisiatif kegiatan dan kemauan untuk mencapai keberhasilan.

Partisipasi dalam pelaksanaan pengembangan mangrove ini, masyarakat dan pemerintah turut ambil bagian antara lain : (a) Memberikan sumbangan berupa materi dan tenaga (b) melakukan kegiatan/ program pengembangan mangrove.

a. Sumbangan Berupa Materi dan Tenaga

Masyarakat Desa Mattiro Baji secara aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan pengembangan Mangrove. Partisipasi tersebut ditunjukkan dengan memberikan sumbangan material dan tenaga.

Hal ini dituturkan oleh kepala Desa mengungkapkan bahwa :

“masyarakat disini sangat antusias ingin melibatkan diri dalam mengembangkan dan melestarikan mangrove, mereka memberikan sumbangan dalam bentuk uang biarpun dengan jumlah yang sedikit, agar masyarakat dapat secara langsung berkontribusi dalam penanaman dan perawatan mangrove.” (Wawancara DN, 07 October 2016).

Mengenai konteks partisipasi uang, masyarakat Desa Mattiro Baji juga memberikan bantuan waktu dan tenaganya untuk mendukung pelaksanaan pengembangan Mangrove. Seperti pernyataan dari tokoh masyarakat berikut ini :

“saya sangat senang dengan desa saya sekarang ini sudah semakin maju. Konsep yang tepat yang telah diterapkan di daerah ini yaitu kegiatan pengembangan mangrove. Saya memang tidak terlalu banyak dapat meluangkan waktu untuk berpartisipasi maupun mengikuti rapat, tetapi saya ikut membantu dalam kegiatan penanaman mangrove serta melestarikannya.” (Wawancara DL, 05 October 2016).

Partisipasi dari individu atau kelompok dengan tenaga yang dimilikinya, melibatkan diri dalam suatu aktivitas dengan maksud tertentu. Seperti yang diungkapkan Tokoh Masyarakat bahwa ;

“Dalam pengembangan mangrove ini saya mungkin merupakan salah satu orang yang sangat antusias akan kemajuan desa ini, saya sering di undang untuk mengisi serta memberikan pengarahan dan keterampilan kepada ibu-ibu PKK di Desa Mattiro Baji yang berkaitan dengan pengembangan dan pelestarian Mangrove.” (Wawancara NS, 07 October 2016).

Pendapat lain tentang keikutsertaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan mangrove di tunjukkan oleh masyarakat yang menyatakan bahwa :

“saya sudah meluangkan waktu untuk membantu karena itu sudah menjadi tugas kami sebagai masyarakat dalam berpartisipasi bentuk tenaga dengan memberikan pengetahuan secara maksimal kepada masyarakat lainnya yang ada disini. Agar mereka bisa turut adil. Namun , hal itu terasa belum cukup mengingat banyaknya yang menjadi kendala yang lain.”(Wawancara DT, 07 October 2016).

Partisipasi masyarakat ditunjukkan dengan ikut serta memberikan bantuan tenaga dan waktu untuk mendukung pelaksanaan pengembangan mangrove. Informan mengikuti organisasi yang ada didaerahnya, sesuai dengan pendekatan partisipasi Verhangen menunjukkan masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan Mangrove.

Pihak pemerintah sendiri mengaku sangat terbantu dengan antusias masyarakat yang turut membantu seperti yang diungkapkan kabid kehutanan :

“ Dengan adanya masyarakat yang ambil bagian karena nilai swadaya telah mereka ketahui dampaknya, seperti halnya sewaktu mangrove ini dirintis, sekarang dalam pengembangannya masyarakat turut untuk menjaga kelestarian karena menjadi daya tarik jika tempat tersebut terawat, serta yang memiliki pengetahuan lebih tentang mangrove ini tidak sungkan untuk berbagi bahkan turut menjadi guide.”(Wawancara HW, 25 september 2016).

Sesuai dengan pendekatan partisipasi masyarakat yang dikemukakan Duesseldorp menunjukkan partisipasi informan merupakan partisipasi terbujuk, karena informan melakukan tindakan partisipasi setelah mendapatkan pengarahan dalam rapat yang mereka ikuti.

b. Melakukan kegiatan/ program pengembangan Mangrove

Masyarakat Desa Mattiro Baji pada umumnya sukarela dan menyambut baik perkembangan desa mereka, termasuk partisipasi mereka dalam melaksanakan kegiatan/ program pengembangan mangrove. Seperti pernyataan kabid kehutanan, berikut ini :

“Saya sangat senang dengan Desa Mattiro Baji sekarang ini sudah semakin maju. Saya melihat perkembangan yang luar biasa di kawasan mangrove. Masyarakat disini sangat berperan penting dalam pelaksanaan pengembangan mangrove, berawal dari kesadaran serta rasa peduli mereka terhadap lingkungan, ekosistem mangrove di Desa ini mengalami tekanan yang cukup berarti bagi masyarakat karena mangrove adalah sumber penghidupan bagi mereka.” (Wawancara HW, 25 september 2016)

Adapun pernyataan yang lain dari masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan/program pengembangan mangrove. Salah satunya dari masyarakat menyatakan sebagai berikut :

“Dalam hal ini, pemerintah juga cukup andil dalam pengembangan mangrove ini kita juga sebagai masyarakat mempunyai peran penting dalam pelaksanaan rencana kegiatan ini,tapi dengan adanya bantuan dari pemerintah kita bisa lebih maju lagi dan kita bisa lebih mengembangkan ekosistem mangrove di Desa kami ini.”(Wawancara DK, 07 October 2016).

Pelaksanaan kegiatan pengembangan mangrove tersebut juga melibatkan tokoh masyarakat seperti Yang diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat bahwa :

“Saya sangat senang ketika ada usulan tentang mengenai kegiatan pelaksanaan pengembangan mangrove, apalagi saya selaku ketua kelompok penyuluhsangat bersemangat karena masyarakat disini juga ikut terlibat dalam membantu kegiatan pelaksanaan mengembangkan atau mengelola mangrove, .”(Wawancara NS, 07 October 2016).

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas maka di simpulkan Pemerintah dalam pengembangan mangrove betul-betul serius dalam pengembangannya,dan dalam pengembangan mangrove masyarakat dan pemerintah harus saling bekerja sama dalam pengembangan agar dapat terlaksana dengan baik.

3. Partisipasi dalam PemanfaatanPengembangan Mangrove

Dalam tahap pemanfaatan ini hasil pengembangan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Keberadaan Mangrove di Desa ini, masyarakat turut andil merasakan manfaat yang ada antara lain (a) pengembangan rumput laut (b) penangkaran ikan dan kepiting.

a. Pengembangan rumput laut

Dalam tahap pemanfaatan ini hasil pengembangan, merupakan unsur terpenting yang sering tak terlupakan. Sebab tujuan pengembangan merupakan tujuan utama. Di samping itu, pemanfaatan hasil pengembangan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu

berpartisipasi dalam setiap program pengembangan mangrove yang akan datang.

Menurut hasil wawancara dengan Kabid Kehutanan yang mengatakan bahwa :

“Dengan adanya pengembangan mangrove, Pemerintah membimbing dan membina masyarakat untuk menghidupkan kembali desa ini, melalui pemanfaatan pengembangan rumput laut. Tak hanya itu, budidaya rumput laut pun menjadi salah satu obyek menarik untuk dilihat sekaligus dipelajari.” (Wawancara HW, 25 september 2016).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengembangan rumput laut maka pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat mempunyai tujuan dimasa yang akan datang dalam membangun desa ini.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa mengatakan bahwa:

“Tujuan awal dalam pengembangan mangrove ini di jadikan sebagai tempat ekowisata dan di harapkan agar roda perekonomian bisa terus berjalan. Namun dalam pemberdayaan ekonomi, masyarakat berpotensi menciptakan lapangan kerja dengan mengembangkan atau mengelola rumput laut agar menambah pendapatan masyarakat.” (Wawancara DN, 07 October 2016).

Adapun pernyataan yang lain dari Tokoh Masyarakat tentang pemanfaatan pengembangan rumput laut yaitu :

“komoditi rumput laut di Desa Mattiro Baji ini perlahan-lahan mendongkrak ekonomi masyarakat setempat. Harga rumput laut yang stabil, tidak jatuh seperti komoditi lain, memberikan peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Mattiro Baji. Dan selain itu, rumput laut juga membuka lapangan kerja baru, selain itu juga kami juga memanfaatkan rumput laut menjadi stick rumput laut, usaha ini sudah berjalan sejak setahun yang lalu dan sudah dijual di berbagai daerah sekitar Takalar, Jeneponto dan Makassar.” (Wawancara DL, 05 October 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sangat berharap dalam pengembangan mangrove memiliki dampak yang positif

dimasa yang akan datang dan masyarakat bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang karena adanya pengembangan rumput laut.

Hasil wawancara dengan masyarakat lain yang mengatakan bahwa:

“Dalam pengembangan rumput laut disini kami masyarakat sangat merasakan manfaatnya sebagai masyarakat yang tinggal di kepulauan, saya sebagai petani rumput laut di desa inisangat berharap bisa membawa warga menjadi berdaya, mandiri, terlepas dari jeratan masalah yang tak kunjung selesai dan dapat menikmati hasil keringat sendiri.”(Wawancara DK, 07 October 2016).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa manfaat dalam pengembangan mangrove yang khususnya di kepulauan Tanakeke bukan hanya melestarikan mangrove tetapi juga mempunyai manfaat yang luar biasa khususnya untuk warga Desa Mattiro Baji.

b. Penangkaran ikan dan kepiting

Masyarakat Desa Mattiro Baji pada umumnya sukarela dalam menyambut baik perkembangan desa mereka, termasuk partisipasi mereka dalam memanfaatkan mangrove sebagai penangkaran ikan dan kepiting. Hal ini ditunjukkan dalam beberapa pernyataan responden yang ditemui, Kabid kehutanan menyatakan bahwa :

“Desa Mattiro Baji adalah salah satu desa di kecamatan Mappakasunggu kepulauan tanakeke yang sebagian besar warganya sebagai pencari ikan dan hasil laut lainnya sehingga masyarakat disana dapat menikmati hasil tangkapannya sendiri.” (Wawancara HW, 25 september 2016).

Kepala Desa menambahkan pernyataan bahwa :

“Tujuan awal dari pengembangan kawasan mangrove ini untuk pengembangan kawasan pesisir melalui penataan lahan mangrove dan menjadikan sebagai tempat penangkaran ikan dan kepiting, supaya warga disini dapat memanfaatkannya dengan baik dan perekonomian mereka terus

berjalan, sebagaimana dengan adanya hutan mangrove ini baik yang punya inisiatif sendiri untuk ikut berpartisipasi misalnya warga dapat memanfaatkan hasil tangkapannya dengan cara menjualnya di luar pulau.”(Wawancara DN, 07 October 2016).

Partisipasi responden dalam pemanfaatan pengembangan mangrove tersebut sesuai dengan pendekatan partisipasi yang dikemukakan Dursseldorp. Partisipasi responden merupakan partisipasi terinduksi, karena responden melakukan tindakan partisipasi setelah mendapat pengarahan dari pemerintah Desa Mattiro Baji. Responden berpartisipasi dalam pengembangan mangrove dengan mengikuti organisasi yang ada di desanya, hal ini sesuai dengan pendekatan partisipasi Verhangen. Pernyataan lain di dapat dari tokoh masyarakat yang berpartisipasi memanfaatkan hasil pengembangan mangrove dengan melakukan penangkaran ikan dan kepiting. Salah satu Tokoh Masyarakat menyatakan sebagai berikut :

“Kehidupan masyarakat disini sedikit demi sedikit mengalami perkembangan, mata pencaharian mereka selain mengandalkan rumput laut juga mengandalkan hasil penangkaran ikan dan kepiting. Warga disini dapat menfaatkan hasil tangkapannya dengan cara mengolahnya sendiri atau bahkan bisa menjualnya agar mendapat uang.”(Wawancara NS, 07 October 2016).

Adapun pernyataan dari masyarakat yang lain tentang pemanfaatan pengembangan mangrove yaitu :

“penangkaran ikan dan kepiting yang dilakukan oleh suami saya bisa dikatakan menjadi salah satu solusi mata pencaharian alternatif yang dapat memberikan pekerjaan baru kepada suami saya ataupun masyarakat lain yang di pulau ini.” (Wawancara DS, 05 October 2016).

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan penangkaran ikan dan kepiting ini cukup tinggi, yang berarti pula mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan mangrove dapat dikatakan tinggi dan

masyarakatpun mempunyai keyakinan setelah adanya program pengembangan mangrove.

4. Partisipasi dalam Pengawasan Pengembangan Mangrove

Kegiatan pengawasan ini sangat diperlukan, bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan, dalam hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan pembangunan sangat diperlukan.

Partisipasi dalam pengawasan pengembangan mangrove ini, masyarakat dan pemerintah turut ambil bagian antara lain: (a) pemeliharaan (b) perlindungan.

a. Pemeliharaan

Dalam organisasi pengelolaan harus dilakukan dengan baik agar kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu fungsi manajemen setelah kegiatan berlangsung adalah pemeliharaan. Sebab dengan adanya pemeliharaan kita dapat melihat kegiatan yang sedang berjalan agar sesuai yang diharapkan. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat bahwa :

“Dalam upaya pengelolaan mangrove yang dilakukan oleh kelompok-kelompok penyuluh tentunya kami memiliki sistem pemeliharaan terhadap pengembangan mangrove. Dan demi berjalannya proses kegiatan ini supaya efektif, pemeliharaan juga penting dalam mengawal setiap aktivitas masyarakat yang mengelolah mangrove.”(Wawancara NS, 07 October 2016).

Pemeliharaan merupakan salah satu fungsi manajemen peranan penting dalam pengelolaan suatu organisasi dalam pengelolaan mangrove. Namun dalam hal ini kemitraan dinas pertanian dan UPTD sangat penting khususnya dalam pengawasan pengelolaan mangrove yang dilakukan oleh kelompok penyuluh. Berikut ini pernyataan dari Kabid Kehutanan bahwa :

“Dalam pemeliharaan pengembangan mangrove ini sangat membantu saya selaku ketua UPTD dalam mengawal kelompok masyarakat penyuluh dalam pengelolaan mangrove, dengan adanya pengawasan ini lebih mendekatkan antara kelompok penyuluh dengan masyarakat biasa dalam mengawasi sistem pemeliharaan mangrove.” (Wawancara HW, 25 september 2016).

Setelah melakukan penanaman, masyarakat Desa Mattiro Baji melakukan pemeliharaan agar pertumbuhan tanaman terkontrol apabila kemungkinan terjadi kerusakan tanaman akibat serangan hama tanaman dan ombak laut sehingga apabila hal tersebut terjadi maka tanaman harus diganti segera dengan bibit baru. Seperti yang di ungkapkan oleh Kepala Desa, bahwa :

“ Pemeliharaan kawasan hutan mangrove yang nilai konservasi tinggi, sehingga pembibitan perlu dilakukan pada hutan mangrove yang telah rusak untuk meningkatkan nilai manfaat langsungnya. Pencegahan hutan mangrove hendaknya berdasarkan kriteria yang jelas dan pertimbangan yang rasional.” (Wawancara DN, 07 October 2016).

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya pemeliharaan tentunya lebih memudahkan Dinas Pertanian terutama ketua UPTD serta kelompok penyuluh mangrove dalam pengelolaan mangrove karena dengan adanya pemeliharaan ini tentunya masyarakat terikat akan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

b. Perlindungan

Ratusan hektar tanaman mangrove mengelilingi kepulauan Tanakeke yakni Desa Mattiro Baji Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar, yang melindungi dari hantaman ombak, khususnya di musim anging kencang. Seperti yang diungkapkan oleh kabid Kehutanan bahwa :

“ kawasan hutan mangrove yang ada di kepulauan tanakeke sangat menguntungkan bagi masyarakat disana selain memberikan penghasilan kepada masyarakat juga melindungi pulau dari hantaman ombak pada saat musim hujan.”(Wawancara HW, 25 september 2016).

Tanpa adanya upaya perlindungan secara berkesinambungan yang melibatkan partisipasi masyarakat di sekitar kawasan, maka upaya pengelolaan pengembangan mangrove kecil kemungkinannya akan berhasil. Untuk itu hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengembangkan partisipasi masyarakat agar terlibat secara aktif dalam kegiatan perlindungan pengembangan mangrove ini. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa bahwa :

“ Saya sebagai kepala desa disini sangat mengharapkan kepada masyarakat agar dapat aktif menjaga dan melindungi kawasan hutan mangrove karena dalam pengelolaan dan pengawasan ini masyarakat dapat diberikan keuntungan.”(Wawancara DN, 07 October 2016).

Strategi pengembangan mangrove yang dilakukan dapat dilihat sebagai upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan nilai ekosistem mangrove, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan. Strategi pelatihan dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan mangrove serta melindunginya.

5. Faktor yang mendukung dan menghambat pengembangan mangrove

Pengembangan mangrove di Desa Mattiro Baji, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, baik itu faktor penghambat maupun faktor pendukung. Faktor-faktor ini harus dihadapi oleh Diskominfo dan Bupdar selaku pihak yang berperan dalam pengelolaan dan pengembangan mangrove di kabupaten Takalar

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam pengembangan mangrove ini terdiri atas dua indikator antara lain : (1) Kerja Sama pemerintah dan masyarakat, (2) Kesadaran Masyarakat.

1. Kerja Sama

Keberhasilan pelaksanaan pengembangan mangrove bergantung pada sinergi kerja sama antara aparat pemerintah daerah dari berbagai instansi terkait, penyuluh pendamping dan penerima manfaat. Seperti yang diungkapkan oleh kabid kehutanan bahwa :

“Kerja sama dalam pengelolaan dan pelestarian mangrove ini sangat diperlukan dalam menyukseskan keberhasilan pengembangan mangrove. Karena percuma saja kita membuang waktu untuk megembangkan mangrove ini jika dari pihak pemerintah atau instansi tidak mau bekerja sama.” (Wawancara HW, 25 september 2016).

Adapun ungkapan Bapak selaku Kepala Desa tentang kerja sama dalam pengembangan mangrove, kepala desa menyatakan bahwa :

“Saya sebagai kepala desa sangat berterima kasih kepada pemerintah dan instansi yang sudah mau bekerja sama dalam pelaksanaan pengembangan mangrove yang ada di desa kami. Dan kami harap kerja sama ini antara pemerintah , instansi ataupun masyarakat yang terkait bisa terjalin sampai kedepannya dan bisa menjadikan kawasan mangrove ini sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya.”(Wawancara DN, 07 October 2016).

Agar kegiatan dilaksanakan dengan tepat sasaran maka harus diidentifikasi dengan benar agar masalah yang ada di lapangan dan melakukan pendekatan yang menyeluruh kepada masyarakat pelaksanaan kegiatan pengembangan mangrove sebaiknya dari kelompok-kelompok yang telah mengakar di masyarakat dan mempunyai keinginan serta komitmen sebagai penyuluh. Secara utuh, kegiatan ini diarahkan untuk menjadi kebutuhan kelompok/masyarakat sehingga keberadaan dan perkembangannya akan bersifat berkelanjutan dan tidak sebatas keproyekan.

2. Kesadaran Masyarakat

Masyarakat sadar bahwa pengembangan dan pengelolaan mangrove menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk dapat mengambil peluang kerja. hal tersebut disampaikan oleh masyarakat bahwa :

“Masyarakat di Desa Mattiro baji sebagian besar masih bekerja sebagai petani, dengan adanya program pengembangan dan pengelolaan mangrove ini saya berharap pemerintah daerah dapat mengembangkan usaha baru seperti pembangunan obyek wisata agar dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.” (Wawancara DT, 07 October 2016).

Strategi ini juga tidak semata-mata hanya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan mangrove serta kemampuan dalam mengelolanya namun juga memberdayakan kehidupan sosial ekonomi mereka. Pendapat tersebut ditambahkan pula oleh Kepala Desa bahwa :

“prinsip dan pedoman pembangunan obyek wisata adalah berdasarkan pada kerakyatan yaitu pengembangan ekowisata harus dapat melibatkan masyarakat serta pengembangannya nanti dapat memberikan manfaat kepada masyarakat misalnya dengan keberadaan obyek wisata dapat memberdayakan kehidupan sosial ekonomi mereka.” (Wawancara DN, 07 October 2016).

Selain masyarakat disekitar pulau, kelompok penyuluh mangrove pengelolaan mangrove juga berusaha menjaga kelestariaanya, seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat dalam wawancara sebagai berikut :

“Dalam melakukan penanaman mangrove ini, kami juga sudah berupaya untuk menjaga kebersihan. Satu kali seminggu kami selalu mengadakan kerja bakti membersihkan ranting-ranting yang sudah kering dan mencabut tanaman mangrove yang sudah mati dan menanamnya kembali dengan bibit mangrove yang masih kecil.”(Wawancara NS, 07 October 2016).

Sesuai dengan startegi pengembangan obyek wisata di Pulau Tanakeke tidak lepas dari peran masyarakat serta masyarakat dan pengelola mangrove itu sendiri karena untuk mencapai peningkatan kualitas kepariwisataan ini dibutuhkan kerjasama dan partisipasi aktif antara pemerintah, masyarakat dan pengelola obyek wisata. Seperti yang diungkapkan oleh kabid kehutananbahwa :

“saya sangat bangga dengan masyarakat disana dan terutama untuk kelompok penyuluh mangrove. Karena mereka dengan kesadaran sendiri mau membantu untuk menjaga kebersihan di sekitar hutan mangrove tanpa ada perintah langsung dari pihak tertentu.”(Wawancara HW, 25 september 2016).

Partisipasi aktif dari masyarakat, dan ketua UPTD pertanian untuk mendukung pengelolaan obyek wisata di Pulau Tanakeke Kabupaten Takalar, memang sudah seharusnya dilakukan mengingat obyek wisata yang ada di Kabupaten Takalar ada banyak dan semuanya belum tentu bisa dikelola. Hal yang paling kecil yang bisa membantu pemerintah adalah memelihara dan menjaga mangrove agar dapat dilestarikan dan dijadikan sebagai obyek wisata.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam pengembangan mangrove ini terdiri atas dua indikator antara lain : (a) Tingkat pendidikan Masyarakat (b) Tehnologi yang kurang

1. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Kondisi daerah pesisir pada umumnya bekerja pada sektor pertanian dan perikanan. Dari data jumlah penduduk Mattiro Baji menurut mata pencaharian tahun 2013, menunjukkan bahwa penduduk Mattiro Baji mata pencahariannya adalah petani padi dan jagung. Rendahnya pendidikan khususnya para orang tua merupakan hal yang mendasar sebagai faktor utama. Orang tua beranggapan bahwa lebih baiknya bekerja membantu mencari uang daripada bersekolah, setidaknya jika membantu orang tua maka ekonomi keluarga akan bertambah. Seperti yang diungkapkan oleh masyarakat bahwa :

“Untuk menjadi orang yang berhasil tidak perlu bersekolah tinggi, yang penting umur sudah cukup dan bisa bekerja pasti jadi orang yang berhasil, pegawai atau bukan yang penting tetap dapat uang. Banyak yang dikampung ini tidak bersekolah tapi bisa kaya. Jadi saya rasa sekolah bukan jaminan kita untuk menjadi kaya.” (Wawancara DS, 05 Oktober 2016).

Anggapan seperti inilah yang kadang muncul dibenak para orang tua. Mereka memilih anaknya untuk bekerja di sawah daripada bersekolah. Para orang tua cenderung memikirkan anak-anaknya agar bagaimana mereka dapat bekerja dan memperoleh uang banyak yang akhirnya mengabaikan yang namanya pendidikan. Pentingnya sebuah pendidikan juga di ungkapkan oleh kabit kehutanan bahwa :

“Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, pendidikan sangat diharapkan turut andil. Karena masyarakat luar yang datang berkunjung tidak sekedar hanya aktifitas untuk jalan-jalan. Adapula yang datang untuk penelitian jadi diharapkan masyarakat setempat dapat menggali informasi untuk disebarkan nantinya.”(Wawancara HW, 25 september 2016).

Tingkat pendidikan dapat berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat menerima pembangunan dalam suatu wilayah, dalam hal pembangunan sarana dan prasarana. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa bahwa :

“Aktifitas yang dilakukan pada pertemuan-pertemuan maupun rapat-rapat yang diadakan pada tingkat desa. Masyarakat cenderung tidak menyampaikan ide dan gagasan karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga hal ini akan membuat pemerintah kurang cepat dalam perencanaan maupun melaksanakan setiap program yang ada.”(Wawancara DN, 07 Oktober 2016).

Selain itu dengan pendidikan yang tinggi proses pengembangan suatu wilayah akan semakin cepat dalam hal pengembangan mangrove karena daya tariknya bukan sekedar untuk kegiatan refreasing melainkan sebagai tempat penelitian juga.

2. Komunikasi

Komunikasi adalah sebuah proses awal dari terbentuknya sebuah implementasi. Tanpa adanya saling komunikasi yang baik akan terjadi *mix communication* dalam percepatan pengembangan mangrove. Berikut ini penjelasan dari kabid Kehutanan bahwa :

“komunikasi itu sangat penting. Dari fakta yang sering ditemukan dilapangan, kegagalan sebuah kebijakan terjadi karena salah komunikasi. Tidak adanya itikad baik masyarakat mencari informasi, tidak adanya itikad baik pemerintah untuk turun langsung mencari aspirasi dari masyarakat utamanya para petani mangrove. Ini sangat penting, jika itu terjadi maka di yakini kegagalan sebuah partisipasi akan nyata, perlu saling komunikasi diantara berbagai elemen.”(Wawancara HW, 25 september 2016).

Berdasarkan pendapat diatas bahwa komunikasi yang tidak berjalan di setiap *stakeholder* akan menjadi penghambat yang sangat serius dalam usaha pengembangan mangrove. Komunikasi merupakan hal yang sangat krusial dan menjadi penentu sebuah partisipasi terhadap pemerintah dan masyarakat. Dengan komunikasi yang berjalan dengan baik, masyarakat seakan diberi stimulus untuk lebih berkarya dan berkembang. Senada yang dijelaskan diatas. Salah satu tokoh masyarakat menyebutkan bahwa :

“komunikasi sangat penting dalam partisipasi masyarakat dalam mengembangkan mangrove contohnya tidak berjalannya komunikasi akan membuat informasi yang sebenarnya penting dalam program pengembangan mangrove malah tidak jadi, saya pikir pemerintah harus merubah gaya komunikasinya terhadap masyarakat dan jangan hanya berpangku tangan.”(Wawancara DL, 05 October 2016).

Jadi menurut pendapat diatas komunikasi yang menjadi penghambat dalam partisipasi pengembangan mangrove. Seperti Edward II (1980) yang mengatakan komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan maupun kepada sasaran kebijakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Mangrove Di Desa Mattiro Baji Kecamatan Mappakasunggu Pulau Tanakeke di Kabupaten Takalar, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan mangrove di Desa Mattiro Baji Kecamatan Mappakasunggu Pulau Tanakeke di Kabupaten Takalar dapat dilihat dari empat aspek yakni : (1) **Partisipasi dalam Perencanaan**, dimana masyarakat sangat antusias mengikuti sosialisasi yang dilakukan, namun masyarakat masih kurang memberikan usulan dan pendapat.(2). **Partisipasi Dalam Pelaksanaan**, dimana masyarakat berpartisipasi dengan memberikan sumbangan berupa materi dan tenaga serta melakukan kegiatan/program pengembangan mangrove. (3). **Pastisipasi Dalam Pemanfaatan**, masyarakat memanfaatkan pengembangan rumput laut yang dapat menambah penghasilan serta melakukan penangkaran ikan dan kepiting untuk kebutuhan sehari-hari. (4). **Partisipasi Dalam pengawasan**, dimana masyarakat sangat melibatkan diri dalam melakukan pemeliharaan pengembangan mangrove serta melakukan perlindungan terhadap hutan mangrove agar tidak mengalami kerusakan.
2. **Faktor pendukung** dalam pengembangan mangrove Desa Mattiro Baji yang paling utama dimana kerja sama masyarakat sangat diperlukan dalam

melakukan kegiatan pengembangan mangrove serta didukung dengan kesadaran masyarakat yang tinggi dalam menjaga kelestarian hutan mangrove. Sedangkan, **faktor Penghambat** dalam pengembangan mangrove Desa Mattiro Baji secara umum adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan komunikasi sehingga kurang menyesuaikan dalam hal kekinian atau teknologi baru

B. SARAN

1. Kepada pemerintah daerah dalam hal ini kantor Dinas kehutanan agar kiranya tetap meningkatkan perannya dalam hal komunikasi kepada masyarakat setempat. Karena masyarakat yang berprestasi akan terdukung dengan pembinaan yang optimal sehingga mampu menjadi aset daerah.
2. Sarana dan prasarana kemasyarakatan agar kiranya dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik, disini sangat dibutuhkan kerjasama antar para kelompok baik itu kelompok kepemudaan, kelompok masyarakat, kelompok mahasiswa, maupun pemerintah agar sama-sama bertanggung jawab atas semua sarana dan prasarana kemasyarakatan.
3. Pemerintah dan masyarakat harus menjaga kelestarian hutan mangrove dan menjaga agar pembabatan liar terhadap hutan mangrove tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, Rini, 2012. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Mangrove Di Desa Eratan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Bahar, A. 2004. *Kajian Kesesuaian dan Daya Dukung Ekosistem Mangrove Untuk Pengembangan Ekowisata di Gugus Pulau Tanakekeh Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan*. Stitut Pertanian Bogor, Bogor.
- Basyuni, M. 2002. *Panduan Restorasi Hutan Mangrove Yang Rusak (Degreded)*. Program Ilmu Kehutanan, Fakultas Pertanian, USU. Medan.
- Bengen, D.G. 2001. *Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut*. Pusat Kajian Bengkulu Utara, Bengkulu. 2004. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2006. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Dahuri, R., Rais, Y., Putra, S.G., Sitepu, M.J., 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Secara Terpadu*. Jakarta. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- . 2003. *Keanekaragaman Hayati Laut: Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Erwiantono (2006) *Kajian Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kawasan Teluk Pangpang Banyuwangi*. (diakses 14 November 2012).
- Haris Herdiansya. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hilyana, Sitti. 2001. *Dampak Pengembangan Parawisata Terhadap Karakteristik Kultural dan Struktural Masyarakat lokal*. Program Sarjana, Institut Pertanian Bogor.
- H.S.J soemarto. 2003. *Inovasi partisipasi dan good governance*. Yayasan Obor Indonesia.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian & Pengembangan Masyarakat: Model & Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora.

- Isbandi Rukminto Adi. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. FISIP UI Press. Depok.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Kusmana, C. 2005. *Rencana Rehabilitasi Hutan Mangrove dan Hutan Pantai Tsunami di NAD dan Nias. Makalah dalam Lokakarya Hutan mangrove Tsunami*, Medan, April 2005
- Mardijono. 2008, *Persepsi dan Partisipasi Nelayan terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Kota Batam*. Program Pasca Sarjana Manajemen Sumberdaya Pantai Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardikanto, 2003. *Redefenisi Penyuluhan*. Puspa, Jakarta.
- Santosa, N. 2006. *Pengelolaan Ekosistem Mnagrove Berkelanjutan di Indonesia*. Dalam bahan pelatihan. "Training Workshop on Developing The Capacity of Environmental NGOs in Indonesia to Effeticvely Implement Wetland Project According to the Ramsar Guidelines and Obyectives of the Convention on Biodiversity". Bogor.
- Sugiyono 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press
- Wibisono, M.S. 2005. *Pengantar Ilmu Kelautan*. PT Grasindo, Jakarta.
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Clyapps Diponegoro University

Peraturan-peraturan :

Undang – Undang No 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (diakses 25 september 2012).

Undang – Undang No 32 tahun 2004 *tentang pemerintahan*, Jakarta

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis, Mirnawati lahir di Bontoramba Sulawesi Selatan pada tanggal 22 juni 1994 merupakan anak kedua dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Dahna dan Ibu Norma , penulis berkembang di Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis, penulis menempuh pendidikan di SD Negeri Manjalling Kecamatan Bajeng Barat pada tahun 2000 dan tamat pada tahun 2006. Kemudian terdaftar sebagai siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Madrasah Tsanawiah Muhammadiyah Mandalle pada tahun 2006 dan tamat tahun 2009. Kemudian melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Muhammadiyah Limbung pada Tahun 2009 dan tamat 2012. Kemudian pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) di Universitas Muhammadiyah Makassar dan menyelesaikan studi di tahun 2017 dengan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Mangrove di Desa Mattiro Baji Kecamatan Mappakasunggu Pulau Tanakeke di Kabupaten Takalar”.